



JOKO WIDODO

PRESIDEN

Vaksin Covid-19 Gratis untuk Semua

Pemda Diminta Ikut Memprioritaskan Program Vaksinasi Tahun Depan

DESAKAN masyarakat agar vaksin covid-19 di Indonesia gratis sebagaimana di sejumlah negara lain akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah memutuskan mencabut kebijakan vaksinasi mandiri yang membuat sebagian masyarakat harus mendapatkan vaksin secara berbayar.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, terkait program vaksinasi, pemerintah telah melakukan kalkulasi ulang terhadap keuangan negara.

► Baca **VAKSIN...Hal 7**



Siapkan 6 Langkah Tangani Covid-19

Gubernur Bergerak Cepat

BENGKULU - Kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu meningkat secara signifikan. Per Rabu (16/12) jumlah kasus positif mencapai 2.699 kasus tersebar di 10 kabupaten/kota. Menindaklanjuti terus bertambahnya kasus Covid-19, Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah pun bergerak cepat.

Dikatakan Rohidin, pemrov sudah melakukan rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Ada 6 langkah yang dihasilkan dari hasil rapat evaluasi dalam rangka penanganan kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Meliputi, menetapkan 4 Rumah Sakit (RS) darurat penanganan Covid-19, yaitu Bapelkes Bengkulu, Wisma Atlet Bengkulu Utara, Rusunawa Bengkulu Selatan, dan balai di Rejang Lebong. Keempat lokasi ini mewakili wilayah selain infrastruktur yang memang sudah tersedia.

► Baca **GUBERNUR...Hal 7**



TIDAK PATUH: Banyak masyarakat tidak menggunakan masker di pasar malam Kelurahan Benteng Permai Rabu (16/5) malam.

SKENARIO VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

PERUSAHAAN FARMASI YANG DISETUJUI KEMENKES UNTUK DIGUNAKAN PRODUKNYA

- PT Bio Farma
 - Sinopharm
 - Moderna
 - Sinovac
 - Pfizer
 - AstraZenica
- Usia penerima vaksin: 18 sampai 59 tahun

JUMLAH PENERIMA VAKSIN SESUAI JUKNIS AWAL

- Jumlah target sasaran 107.206.544 sasaran atau 67% dari sekitar 160 juta usia 18 – 59 tahun.
- Kebutuhan vaksin 246.575.051 dosis termasuk wastage rate vaksin 15%
- Tenaga kesehatan yang terlibat: 440.000 orang
- Vaksinator yang dilibatkan 23.000 orang

SUMBER : DIKELOLA DARI BERBAGAI SUMBER

Cab. Bandung

Refill Parfume

MOTOGP



MORBIDELLI VALENTINO ROSSI

Rossi Diharapkan Bantu Morbidelli

SEPANG - Petronas Yamaha bakal memiliki line-up pembalap unik pada musim 2021. Mereka kedatangan Valentino Rossi. Pembalap veteran tersebut bertukar tempat dengan Fabio Quartararo. Nah, Rossi bakal berbagi garasi dengan Franco Morbidelli, "muridnya" di Akademi VR46.

► Baca **ROSSI...Hal 7**

LET'S GO TOYOTA BEYOND

Agung TOYOTA

INDULGE IN THE THRILL IN CHARGE OF BETTER FUTURE

COROLLA CROSS TWO SIDES OF THE FINEST

GASOLINE

HUBUNGI : **AGUNG TOYOTA**
BENGKULU - Jl. P. Natadiri No.103 Telp. 0736 - 21127
HOTLINE BENGKEL : 0736 - 23036
BOOKING SERVIS : 08537776873



SERAHKAN: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyerahkan SK CPNS, Rabu pagi (16/12) di Gedung Pola Provinsi Bengkulu.

Jadi ASN Handal dan Profesional

Kemenag Hapus 1.597 Jabatan

BENGKULU - Sebanyak 34 peserta lulus seleksi CPNS formasi tahun 2019 di lingkungan Pemrov Bengkulu resmi menjadi CPNS. Kemarin (16/12), ke-34 peserta ini mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

SK CPNS diserahkan langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. "Inikan penerimaan CPNS melalui sistem CAT jadi objektifitasnya bagus. Kita harapkan mereka menjadi tenaga

kerja yang betul betul handal profesional. Menjadi tenaga aparatur yang mempunyai untuk membangun Provinsi Bengkulu," imbuh Rohidin.

► Baca **JADI...Hal 7**

Batch 6 Termin II Cair Minggu Ini

Kejar Target Sebelum Tutup Tahun

JAKARTA - Nasib 1,3 juta pekerja/buruh penerima bantuan subsidi upah (BSU) akhirnya terjawab sudah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengabarkan, penyaluran batch 6 telah dilakukan. Dia mengatakan, proses pemadanan data dengan dirjen pajak (DJP) telah selesai dilaksanakan. Sehingga

penyaluran BSU batch 6 di termin kedua bisa dilakukan. Sebagai informasi, proses pemadanan data 1,3 juta pekerja/buruh tersebut memang cukup lama. Berdasarkan isu bahwa ada perbedaan data gaji yang disetorkan ke DJP dan BP-

Jamsostek. Sayang, tak ada jawaban dari Kemenaker ketika dikonfirmasi. "Sudah kami transfer ke bank sejak Selasa (15/12) lalu," ujarnya dalam diskusi FMB9, kemarin (16/12).

► Baca **BATCH...Hal 7**

Patuhi Protokol Kesehatan

#DENGAN

SELALU GUNAKAN MASKER

Vaksin Covid-19 Gratis untuk Semua

Sambungan dari halaman 1

”Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujarnya di Istana Merdeka Jakarta kemarin (16/12).

Karena itu, dia telah memerintahkan memerintahkan seluruh jajaran kabinet, lembaga negara, maupun pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tahun depan. ”Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini,” lanjutnya. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin Covid-19.

Selain itu, ada sedikit perubahan terkait prioritas vaksinasi untuk tahun depan. ”Nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali,” tambahnya. Hal itu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Yang jelas, meskipun nanti sudah ada vaksin, presiden meminta agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

Sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan vaksin gratis hanya untuk 30 persen penduduk. Selebihnya harus melakukan vaksinasi mandiri. Kemudian, kebijakan tersebut berubah lagi baru-baru ini, menjadi 50:50. Artinya 50 persen gratis dan 50 persen berbayar. Kini, vaksinasi berbayar secara resmi dihapuskan dan seluruh masyarakat akan mendapatkan vaksinasi secara gratis.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya sudah menghitung bahwa anggaran PEN tidak akan terserap 100 persen hingga akhir tahun ini. ”Sebagian dana yang sisa nanti akan kita gunakan tahun depan (untuk) program vaksinasi nasional, yang rencananya membutuhkan dana yang cukup besar,” terangnya di kantor presiden kemarin.

Hingga 14 Desember lalu, realisasi PEN mencapai Rp 481,6 triliun atau 69,3 persen dari total anggaran Rp 695 triliun. Rencananya, bakal ada realisasi untuk pembiayaan korporasi pada akhir tahun ini. Pagu yang dianggarkan bernilai Rp 61,22 triliun dan sampai 14 Desember lalu baru terealisasi Rp 8,15 triliun.

Kementerian Kesehatan merupakan kementerian teknis dalam vaksinasi ini. Sebelumnya kementerian yang dipimpin oleh Terawan Agus Putranto itu telah menyusun buku petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Merujuk dari buku tersebut, ada dua skema yang dijalankan. Pertama vaksin program pemerintah, lalu vaksin mandiri.

Vaksinasi program pemerintah memiliki sasaran 32.158.276 orang dengan rentan usia 18-59 tahun. Dengan jumlah tersebut maka membutuhkan 73.964.035 juta dosis. Selanjutnya vaksin mandiri sasarnya 75.048.268 orang. Vaksinasi mandiri ini membutuhkan 172.611.016 dosis.

Terkait dengan pengumuman Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan seperti halnya harus menata kembali petunjuk teknisnya. Jawa Pos mencoba menghubungi Juru Bicara Kemenkes untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. Menurutnya, untuk saat ini belum ada perubahan petunjuk teknis. ”Ini masih baru ya pengumumannya jadi kami matangkan dulu tindak lanjutnya ya,” ungkapnya melalui pesan singkat kemarin. Stafus Kemenkes Alexander Ginting hanya menuturkannya bahwa vaksin semua untuk rakyat sesuai kriteria inklusi dan eksklusif.

Keputusan Presiden agar vaksin

digratiskan mendapat tanggapan dan apresiasi dari legislatif. Terkhusus Komisi IX yang memang membidangi kesehatan. Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyebutkan bahwa pemerintah perlu memang target dan setidaknya bisa memenuhi target pemberian vaksin kepada 70 persen masyarakat.

Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah memperbaiki data penduduk yang diproyeksikan menerima vaksin gratis tersebut. ”Termasuk keseimbangan persebaran vaksin. Paling tidak target 70 persen jumlah populasi harus dapat dipenuhi,” ungkapnya kemarin.

Pengumuman bahwa vaksin akan digratiskan menurutnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memutus rantai persebaran Covid-19. Namun, niat tersebut juga harus dibarengi dengan prosedur yang transparan dan efektif.

Saleh mendorong agar berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan berkoordinasi sebaik mungkin. Antara Kementerian Dalam Negeri untuk data penerima vaksin, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, TNI, dan Polri.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak gaduh dalam pemberian vaksin tersebut. Dengan digolkannya pemberian vaksin gratis, maka menurut Saleh seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang menolak untuk diberi vaksin Covid-19.

”Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan vaksinasi secara gratis,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, negara sedang krisis, maka vaksin tidak harus digratiskan semua. Vaksin hanya gratis untuk masyarakat tertentu. Jika digratiskan semua, maka pemerintah membutuhkan anggaran sangat besar. ”Apakah anggarannya dari pajak atau utang?,” ungkapnya.

Yang lebih penting sekarang, lanjut dia, proses persiapan vaksin harus segera diselesaikan, karena sampai sekarang belum ada kepastian, kapan vaksinasi dimulai. Selanjutnya, izin edar juga harus dipastikan keluar. Jangan sampai vakasinya sudah siap, tapi izin edar tidak keluar. Jika izin edar tidak ada, maka vaksinasi tidak bisa dilakukan.

Legislator asal Dapil Jatim X itu mengatakan, pemerintah juga harus segera menyiapkan data sasaran. Yaitu, siapa saja yang akan menjadi prioritas vaksin dan daerah mana saja yang akan perlu didahulukan. ”Soal data ini sangat penting,” urainya.

Gus Jazil mengatakan, daerah yang perlu mendapatkan prioritas vaksin adalah daerah yang harus segera dipulihkan ekonominya. Sebab, salah satu tujuan vaksin digratiskan ialah untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung vaksin gratis bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Maka, Banggar DPR merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan alokasi anggaran APBN pada 2021. ”Untuk menopang pelaksanaan program vaksinasi cegah Covid-19 dan sarana pendukungnya,” terangnya.

Said menjelaskan, pada APBN 2021 alokasi anggaran pengadaan vaksin covid-19 sebesar Rp 18 triliun, anggaran vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang program pengadaan vaksin dan vaksinasi. Jadi, total anggaran Rp 23 triliun.

Menurut dia, anggaran pengadaan vaksin Covid-19 masih sangat mungkin dinaikkan dari

plafon pada APBN 2021 sebesar Rp 23 triliun. Berbagai alternatif anggaran bisa digunakan demi menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk segenap rakyat.

Misalnya, kata dia, dengan penggunaan dana cadangan APBN 2021. Terlebih lagi, program vaksinasi tidak akan mungkin tuntas pada 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung proses simulasi vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta, kemarin (16/12). Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mengaku telah menyaksikan langsung urutan dari prosedur yang harus dilalui untuk melaksanakan vaksinasi.

”Saya sangat mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh RSPI Sulianti Saroso,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Dia menekankan, agar pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara hati-hati dan dipastikan keamanan serta kenyamanannya. Selain itu, faktor penyerta juga dimintanya untuk dipelajari secara seksama, mengingat ada kemungkinan akan memunculkan dampak negatif terhadap hasil vaksinasi.

Menurutnya, vaksinasi ini kepentingannya juga sebenarnya sama. Masyarakat ingin aman sehingga bisa beraktivitas kembali. Pemerintah pun demikian, ingin agar kondisi sosial ekonomi kembali pulih.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir yang hadir mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meyakini bahwa pada saatnya nanti, vaksinasi akan berjalan aman sesuai prosedur. Pasalnya, para petugas dan nakes telah dibekali pelatihan khusus agar terlatih. ”Namun yang paling utama adalah edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Pemerintah, kata dia, dalam hal ini telah menyiapkan satu konsep komunikasi publik sehingga diharapkan masyarakat mau dan siap untuk divaksinasi. Sejumlah rumah sakit diakuinya sudah mulai mengeluarkan brosur untuk vaksinasi saat ini.

”Untuk sementara memang kita masih menunggu rekomendasi dari Badan POM. Setelah itu nanti kemudian baru akan ditentukan vaksin mana yang akan dipakai,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril melaporkan, dari total 575 tenaga kesehatan (nakes) yang ada di RSPI Sulianti Saroso sebanyak 375 orang masuk kriteria untuk divaksinasi. Mereka dipilih setelah dilakukan screening kesehatan dan dalam kondisi sehat, tidak hamil, serta tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

”Saat ini kami sudah membentuk panitia persiapan vaksinasi. Jadi bila vaksin datang insya Allah kami sudah siap,” ungkapnya.

Dia berharap, proses vaksinasi nanti berjalan lancar. Sehingga, bisa menambah imunitas bagi nakes yang sehari-hari berhadapan langsung dengan pasien.

Vaksinasi bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sesuai amanat Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Vaksinasi hanya bisa diberikan pada mereka yang sehat sebagai bentuk pencegahan. (jpg)

Batch 6 Termin II Cair Minggu Ini

Sambungan dari halaman 1

Meski tak menyebut kapan uang akan masuk ke rekening penerima, Anwar berharap proses transfer dari bank ke penerima manfaat dapat segera dilaksanakan. Mengingat, tutup tahun anggaran sudah semakin dekat. ”Karena kalau sudah tutup anggaran, kami tidak dibolehkan lagi untuk melakukan penyaluran,” tuturnya.

Dia optimis, penyaluran bisa mencapai target sebelum tutup tahun. Mengingat saat ini, pencairan sudah mencapai 89 persen atau 11,04 juta orang di termin II ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Mena-ker) Ida Fauziyah memaparkan, hingga 14 Desember 2020, total penyaluran bantuan subsidi gaji/ upah sejak termin I hingga termin II telah mencapai 93,34 persen dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun.

Pada termin I, lanjut Ida, sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan nilai sebesar Rp14,71 triliun. Sedangkan pada termin II, telah tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun.

”Proses penyaluran masih terus dilakukan,” katanya.

Diakuinya, dari seluruh termin penyaluran, memang belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan adanya sejumlah data rekening penerima yang bermasalah. Sehingga penyalurannya terhambat, terutama pada termin pertama.

”Pada termin pertama, berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur,” jelasnya.

Atas adanya rekening retur tersebut, data pun akhirnya dikembalikan kepada BPIjamsostek untuk diperbaiki kembali. BPIjamsostek

kemudian akan mengembalikan data ke pemberi kerja untuk direvisi. Apabila data tersebut telah direvisi, maka Bank Penyalur akan kembali menyalurkan BSU.

Sementara, untuk termin II, ada pepadanan data pajak. Hal ini dilakukan atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dilakukan monitoring serta evaluasi terlebih dahulu pada penyaluran termin I untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.

”Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran,” katanya.

Disinggung soal kelanjutan ban- sos senilai Rp 600 ribu perbulan ini di tahun 2021, Politisi PKB itu mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan diskusi dengan KPC PEN. Namun yang pasti, pihaknya siap mendukung program yang sangat baik ini kembali muncul tahun depan. (mia/wan)

Gubernur Bergerak Cepat

Sambungan dari halaman 1

”Tujuannya agar jangan sampai kasus ringan, sedang langsung masuk rumah sakit tapi mereka bisa dirawat dengan standar rumah sakit di RS darurat. Sehingga akan memudahkan penyembuhan. Saya harapkan dengan pola ini tingkat persentase kesembuhannya semakin baik,” papar Rohidin.

Lanjut Rohidin, langkah lainnya meminta seluruh rumah sakit mengupgrade agar memodifikasi memiliki ruang isolasi yang baik di seluruh kabupaten/kota. Kemudian menyiapkan tes PCR dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium di masing-masing kabupaten/kota. Agar tidak terjadi penumpukan sampel tes yang diambil. Serta merekrut tenaga kesehatan untuk pendampingan perawatan bagi pasien kasus Covid-19.

”Terkait upaya pencegahan ini, kepatuhan kita pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu harus betul-betul ketat. Harus kembali kita advokasi betul masyarakat kita,” tegas Rohidin.

Sementara itu, Pemprov Bengkulu belum melarang resepsi atau pesta pernikahan ditengah pandemi Covid-19 yang kasusnya terus meningkat secara signifikan. Pesta pernikahan tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan namun harus dengan standar penanganan Covid-19, dan perlu dimodifikasi.

”Pesta pernikahan tetap dimungkinkan untuk dilakukan tapi bisa kita modifikasi standar agar standar penanganan covid. Boleh pesta tapi tidak boleh membuka masker,” kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Hal itu dimaksudkan, sambung Rohidin dalam rangka pencegahan Covid-19. Kemudian masyarakat juga perlu diadvokasi termasuk pada saat menggelar resepsi pernikahan. Memastikan suhu orang yang hadir dengan dilakukan pemeriksaan suhu badan terlebih dulu. Lalu mencuci tangan, menjaga jarak serta tidak boleh melepas masker selama berada di lokasi pesta pernikahan.

”Dan jangan makai pakai prasmanan (makan), bisa pakai nasi kotak. Kalau sudah prasmanan pasti masker dibuka,” tegas Rohidin.

Untuk diketahui, per Rabu (16/12) terdapat penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 156 kasus. Menjadi rekor tertinggi dalam penambahan kasus di Provinsi Bengkulu dalam satu hari. Penambahan kasus baru ini berasal dari 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Bengkulu

SURAT EDARAN WALIKOTA

1. Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan, seperti resepsi, pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah, dan perayaan natal.
2. Tidak mengadakan kegiatan penyambutan tahun baru 2021
3. Tidak mengadakan pasar malam dan konser musik
4. Rumah-rumah ibadah, pemilik/pengelola tempat hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, rumah makan, agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti setiap pengunjung wajib memakai masker, menyediakan, tempat cuci tangan/sabun, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas ruang yang tersedia.
5. Kusus restoran dan kafe jam bukan dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB
6. Seluruh ASN Pemkot Bengkulu untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home) kecuali ASN yang bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti RSHD, pukemas, perizinan, dukcapil, pemadamserta menghimbau kepada BUMD dan perusahaan swasta untuk meyusuaikan.
7. Bagi masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi terhdap Covid-19 seperti ibi hamil/menyusu dan warga yang berusia lanjut (lansia) dianjurkan agar menghindari keramaian, keluar rumah, dan lebih baik berdiam diri di rumah.
8. Dengan keluaran SE ini maka SE Walikota Bengkulu nomor 450/18/B. Kesbangpol tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masa pola hidup baru tidak berlaku lag; dan
9. SE Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai pemberitahuan berikutnya bilamana pandemi Covid-19 sudah dinyatakan terkendali.

sebanyak 56 kasus, Rejang Lebong ada 21 kasus, Lebong ada 1 kasus, Bengkulu Utara 17 kasus, Bengkulu Selatan 13 kasus, Bengkulu Tengah 3 kasus, Kepahiang ada 2 kasus, Seluma ada 3 kasus, Kaur ada 3 kasus dan Mukomuko sebanyak 37 kasus.

”Jumlah sampel keluar hasil hari ini (kemarin, red) ada 467 sampel, diantara sebanyak 156 sampel dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Total kasus positif saat ini menjadi 2.699 kasus,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni.

Dari jumlah kasus positif ini, sambung Herwan, terdapat kasus sembuh sebanyak 1.764 orang. Dengan adanya penambahan kasus sembuh per Rabu (16/12) sebanyak 40 orang. Lalu terdapat kasus meninggal dunia totalnya sebanyak 98 orang. ”Ada penambahan kasus meninggal sebanyak 2 kasus, yaitu semuanya dari Kota Bengkulu,” demikian Herwan.

Sementara itu, terjadi lonjakan kasus Covid-19 Walikota Bengkulu tertanggal 16 Desember mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penghentian kegiatan yang bersifat keramaian atau kerumunan. Karena adanya lonjakan kasus akibat dari lemahnya masyarakat terhadap protokol kesehatan pandemi Covid-19.

”Diharapkan semua mematuhi SE walikota, tidak mengadakan hal yang bisa menyebabkan keru-

munan, terlebih menjelang tahun baru agar tetap berada di rumah,” kata Pejabat Sekretaris Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Bujang HR.

Dalam SE Walikota yang berisi pertama agar tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan, seperti resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah perayaan tahun baru. Selanjutnya tidak mengadakan kegiatan perayaan penyambutan tahun baru, tidak mengadakan pasar malam dan konser musik.

”Kepada tempat hiburan agar tidak melakukan kegiatan yang terjadi keramaian dan masyarakat agar mentiadakan peryaaan tahun baru,” jelasnya.

Sementara itu, pasar malam di Kelurahan Bentiring Permai tidak jauh dari kompleks perkantoran Pemkot Rabu malam (16/12) masih ramai dikunjungi warga dan terjadi kerumunan. Pasar malam yang berbagai kegiatan permainan dan jual beli pakaian dan lainnya membuat warga mendatangi lokasi tersebut.

Di lokasi tersebut sulit menghindari kerumunan, terlihat juga sejumlah warga tidak menjaga jarak dan tanpa menggunakan masker. Meskipun dilokasi sudah disediakan tempat cuci tangan dan selalu diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. (key/juu)

Jadi ASN Handal dan Profesional

Sambungan dari halaman 1

Lanjutnya, ASN harus mampu berkembang melewati batasan - batasan yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Tidak terbatas hanya kepada job desk maupun instansi. Rohidin juga mengingatkan penting bagi ASN untuk mengupgrade diri dengan wawasan, pengetahuan dan keterampilan. Lalu bangun karakter keperibadian yang baik ketika bertugas yang didasari oleh keikhlasan dan kesungguhan.

”Ketiga faktor ini penting sekali ketika menjalankan tugas. Saya berharap mereka ini nanti dapat memberikan performa kinerja yang baik, di samping mengeluarkan kreatifitas yang dimiliki untuk kemajuan Provinsi Bengkulu,” tukas Rohidin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Diah Irianti menambahkan, usai mendapatkan SK pengangkatan, para CPNS formasi tahun 2019 ini juga diberikan pembekalan. Para CPNS baru ini dibekali materi - materi terkait dengan masing - masing OPD yang ada di Provinsi Bengkulu.

”Tadi (kemarin, red) dari pak gubernur sudah memberikan arahan. Nanti sedikit-sedikit

dari seluruh bidang di BKD juga memberi pembekalan hal - hal yang berkaitan dengan disiplin, proses pangkat, juga mereka tidak boleh pindah sebelum 10 tahun,” demikian Diah.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) berupaya menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk membentuk birokrasi yang ramping. Total ada 1.597 jabatan administrasi dihapus lalu disetarakan menjadi jabatan fungsional.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenag Priyono mengatakan, mereka telah memulai proses penyederhanaan birokrasi sejak November 2019. Diawali dengan identifikasi jabatan administrasi yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional. ”Hasil identifikasi jabatan ini lalu diajukan ke KemenPANRB pada 30 Desember 2019,” katanya kemarin (16/12).

Awalnya Kemenag mengajukan perampingan jabatan administrasi pada kantor pusat saja. Selanjutnya pada 29 Juni 2020, Kemenag kembali mengajukan 1.597 daftar usulan penyetaraan jabatan untuk kantor pusat, instansi vertikal, dan PTKN (perguruan tinggi keagamaan negeri).

Hasilnya Kementerian PANRB menyetujui perampingan

sebanyak 1.555 jabatan administrasi. Perinciannya adalah 200 jabatan administrator eselon III, 1.346 pengawas eselon IV, dan 9 pejabat eselon V. ”Ini merupakan gabungan dari unsur pejabat pada kantor pusat, instansi vertikal, dan PTKN,” katanya.

Untuk tindak lanjut perampingan jabatan birokrasi itu, Kemenag melantik 375 pejabat fungsional hasil penyetaraan di Jakarta kemarin (16/12). ”Penyederhanaan birokrasi di Kemenag memasuki babak baru,” kata Sekjen Kemenag Nizar saat memimpin pelantikan.

Pejabat fungsional yang dilantik itu sebelumnya menjabat sebagai eselon III dan IV di Kemenag. Nizar mengatkan pejabat fungsional yang ia lantik baru untuk kantor Kemenag pusat. Sedangkan jabatan fungsional Kemenag di daerah dan di PTKN diserahkan ke pimpinan masing-masing.

Dia menegaskan pejabat fungsional yang dilantik saat ini merupakan hasil dari proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. (key/wan)

Rossi Diharapkan Bantu Morbidelli

Sambungan dari halaman 1

Musim lalu, Quartararo dan Morbidelli tampil mengejutkan di kelas premier. Keduanya masing-masing mendulang tiga kemenangan. Sayang, Quartararo yang bersinar pada awal musim harus terseok-seok pada paro kedua 2020.

Sebaliknya, Morbidelli malah bersinar terang pada paro kedua musim lalu. Padahal, Morbidelli hanya menggunakan motor spesifikasi 2019. Meski begitu, Morbidelli sukses finis sebagai runner-up pada musim 2020.

Itu menjadi musim terbaik

Morbidelli selama tiga tahun kiprahnya di kelas premier. Saat kali pertama bergabung dengan Petronas Yamaha, capaian terbaiknya adalah finis kelima di empat GP berbeda.

”Aku yakin Franky (Morbidelli) akan melanjutkan penampilan terbaiknya di MotoGP tahun depan,” papar Team Principal Petronas Yamaha Razlan Razali dilansir laman resmi MotoGP. Dia berharap banyak kepada pembalap 26 tahun itu agar bisa bersaing dengan para rider top di kelas premier.

Dan, keberadaan Rossi yang merupakan guru Morbidelli

diharapkan bisa membantu Petronas Yamaha mendulang prestasi. Apalagi, Petronas Yamaha adalah salah satu tim satelit yang mampu mendobrak dominasi tim pabrik lainnya mampu mengungguli tim pabrik Monster Yamaha di tabel klasemen tim. Petronas mengumpulkan total 248 poin atau 70 poin lebih banyak dari raihannya poin Monster Yamaha.

”Dengan bergabungnya Valentino, itu akan menjadi perasaan yang luar biasa,” lanjut Direktur Tim Johan Stigefelt. (nap/c17/bas/jpg)

Karyawati Dinodai Pacar

Leher Dicekik, 4 Kali Diperkosa

BENGKULU - Daftar kasus kekerasan pada perempuan kembali bertambah. Ini setelah salah seorang karyawan perusahaan di Kota Bengkulu, DS (27) warga Kelurahan Lingkar Barat melapor ke Polres Bengkulu sebagai korban perkosaan. Terlapor, pacarnya sendiri WP (27) warga Kelurahan Kebun Tebeng, juga karyawan swasta.

Dalam laporan DS ke Polres Bengkulu, Senin (14/12) sekitar pukul 11.00 WIB, pemerkosaan itu berawal pada WP mengajak DS menginap ke salah satu hotel di Kota Bengkulu sekitar bulan

Mei 2020. Modusnya akan mengobati penyakit yang diderita oleh korban.

Singkatnya, tiba di hotel WP malah mengajak korban melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Korban menolak. WP yang diduga sudah sangat ingin ini, merespon penolakan korban dengan melakukan kekerasan. Leher korban ia cekik, sambil merebahkan tubuh korban ke tempat tidur. Sekuat tenaga korban melakukan perlawanan, namun kalah tenaga.

Dibawah ancaman, korban yang tak lagi berdaya berhasil direnggut kesuci-

annya oleh pelaku. Tak tanggung-tanggung, versi korban kepada polisi, malam itu setidaknya empat kali ia diperkosa WP di tempat yang sama.

Tindakan yang dilakukan WP tidak sampai di situ saja. Dia juga memukul DS serta meminta uang seraya mengancam akan memutuskan hubungan dengan korban dan membatalkan niatnya menikahi korban.

Selesai kejadian tersebut, WP menghilang. Tak bisa lagi dihubungi korban. Setelah tujuh bulan menunggu niat baik WP datang dan memastikan me-

nikahi korban tak kunjung kepastian, akhirnya korban membeberanikan diri menceritakan pemerkosaan ini kepada keluarga.

Tidak dapat menerima perbuatan WP tersebut, korban didampingi keluarganya melapor ke Polres Bengkulu. "Ya ada laporannya. Masih dipelajari dan didalami penyidik untuk ditindaklanjuti," ujar Kapres Bengkulu AKBP. Pahala Simanjuntak S.I.K. (wij)



PAHALA SIMANJUNTAK

Hijazi Penuhi Panggilan Polda

BENGKULU - Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi, kemarin (16/12) pagi mendatangi gedung Reskrim Polda Bengkulu. Dia memenuhi panggilan tim penyidik Subdit Cyber Crim Reskrimsus Polda Bengkulu terkait aduan masyarakat (Dumas) atas kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya di media sosial, facebook.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai korban dugaan pencemaran nama baik, Hijazi didampingi kuasa hukum Elpes Perlesi, SH membenarkan kedatangan memberikan keterangan terkait laporan kuasa hukumnya pada Senin (30/11) lalu. Laporan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, yakni percakapan di media sosial yang menuju kepada kehidupan pribadi dan keluarganya. Bukan hanya jabatan dirinya sebagai Bupati Rejang Lebong saja.

"Kita harap ini diusut tuntas. Ini juga bertujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bijak," sampainya

Ditambahkan Hijazi, ia sebagai kepada daerah bukan kali pertama ini mendapat serangan melalui medsos. Akan tetapi untuk selama ini ia merasa semuanya hanya kritikan buat dirinya sebagai bupati. "Tetapi yang kali ini bukan lagi kritikan, sudah mengarah ke pencemaran nama baik. Sudah menuju ke peribadi, padahal saya tidak kenal sama sekali dengan orang itu," tegasnya.

Selaku PH Hijazi, Elpes menyerahkan semua proses hukum aduannya kepada penyidik Subdit Cyber Crim Reskrimsus Polda Bengkulu. Sebagai alat bukti yang didapatnya berupa kopian dari postingan tersebut, sudah diberikan kepada penyidik. "Kita lupa kapan postingan tersebut. Kita sudah serahkan semuanya kepada penyidik," pungkasnya. (wij)



DATANGI: Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi usai mendatangi Gedung Reskrim Polda Bengkulu, kemarin (16/12).

Honorar Penipuan CPNS Ditahan Polda Bengkulu

BENGKULU - Tersangka penipuan dengan modus bisa meluluskan seseorang sebagai CPNS, SM (38) seorang perempuan, warga Kota Bengkulu berhasil dibekuk tim Jatanras Direktorat Reskrim Polda Bengkulu, kemarin (16/12). Selesai menjalani pemeriksaan awal, tadi malam SM harus menginap di sel Polda Bengkulu guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, SM dilaporkan Nurhayati, warga Kelurahan Sawah Lebar, Rabu (18/11) lalu. SM disebutkan telah melakukan penipuan dengan janji lulus CPNS. Setelah korban yang menyerahkan uang pelicin Rp 800 juta lebih, SM tak dapat menepati janjinya.

Disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Kombes Teddy Suhendyan Syarif S.I.K. M.Si melalui Kasubdit Jatanras Kopol. Widiardi, untuk mempermudah proses selanjutnya, penyidik menahan tersangka. "Saat ini prosesnya masih melengkap berkas perkara. Jika telah rampung maka langsung kita serahkan jaksa. Selama proses ini berjalan, tersangka kita tahan," ujar Widiardi.

Ditambahkannya, untuk sementara baru satu tersangka. Tidak menutup kemungkinan dari pengembangan nanti tersangka bertambah. "Tersangka ini sebagai honorer di salah satu dinas di kabupaten," katanya.

Seperti dilansir sebelumnya, penipuan berawal September 2019 lalu SM menawarkan kepada Nurhayati, ada lowongan menjadi CPNS di Kabupaten Bengkulu Tengah lewat jalur belakang. Syaratnya harus menyiapkan uang pelicin. Tertarik, Nurhayati menyiapkan uang Rp 800 juta untuk dua orang cucunya agar bisa menjadi PNS.

Sayangnya, setelah uang pelicin diberikan ternyata cucunya tidak lulus tes CPNS. Saat ditagih, SM hanya mampu mengembalikan uang Rp 100 juta hingga akhirnya kasus ini berujung ke polisi. (wij)



SAKSI DIPERIKSA: Persidangan dugaan korupsi jual beli lahan hibah Pemkot Bengkulu yang berlangsung di PN Bengkulu.

PH: Peta Lokasi Bukan Dasar Hak Lahan

BENGKULU - Sidang lanjutan dugaan korupsi jual beli lahan hibah Pemkot Bengkulu, berlangsung Selasa (15/12) siang. JPU menghadirkan enam orang saksi. Diantaranya, M. Dani Kabag Pemerintahan Kota Bengkulu, Munardi Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kota Bengkulu Tahun 1996, Kepala BPKAD Kota Bengkulu Arif Gunadi, Kepala BPN Kota Bengkulu Adam Hawadi, Priono dan Taman dari PT Tiga Putra Mandiri.

Keterangan beberapa saksi di hadapan majelis hakim diketuai Riza Fauzi, SH, CN, menyebutkan tak mengetahui pembebasan lahan pemkot yang terjadi pada tahun 1994-1995 itu. Kendati demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkulu, Nelly, SH menegaskan dari keterangan saksi yang dihadirkan ia tetap masih optimis dengan dakwaan yang telah disampaikan, yang menjerat dua terdakwa, Dewi

JPU Optimis akan Dakwaan

Hastuti dan Malidin.

"Saksi yang kita panggil ini kebetulan hanya satu orang yang memang ada pada saat pembebasan lahan tahun 1994 sapa 1995 tersebut. Dia itu bagian pengukuran. Sedangkan saksi-saksi lain memang belum menjabat pada waktu itu, sehingga tidak mengetahui dokumen yang ada. Untuk sidang berikutnya kita akan hadirkan saksi yang memang mengetahui pembebasan lahan," sampai Nelly usai persidangan.

Ditambahkan Nelly untuk sidang minggu depan, Selasa (22/12) pihaknya juga akan menghadirkan saksi ahli. Diantaranya ahli hukum dari Unib dan BPKP. "Kita juga akan mengusahakan memanggil pihak kementerian terkait untuk hadir sebagai ahli," sampainya.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa Dewi Hastuti, yakni Hotma T Sihombing, SH mengatakan dari saksi yang dihadirkan selama persidangan semesta jelas kalau yang diperkarakan ini bukan aset Pemerinta Daerah (Pemda)

Kota Bengkulu, "Hal ini kita lihat dari penjelasan saksi yang dihadirkan. Salah satu alat bukti menurut jaksa itu sangat akurat menunjukan itu tanah pemda. Ada peta lokasi menyebutkan lahan seluas 62 hektare. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari BPN, peta itu bukan menunjukkan kepemilikan. Artinya itu hanya proses awal sebelum adanya pembebasan," bebernya.

Ditambahkan Deden Abdul Hakim, SH yang juga selaku PH terdakwa Dewi Astuti, alat bukti peta situasi dimunculkan dalam persidangan oleh JPU sempat menjadi pertanyaan. Bukti-bukti dimiliki JPU yakni peta situasi terbit di tahun 1995. Sedangkan bukti pembebasan lahan tercatat di tahun 1994.

"Kalau kita plotting dulu pada tahun 1995 maka pembebasan juga harus tahun 1995. Ini kok pembebasannya pada tahun 1994. Kita tanya kepada BPN mana yang lebih dulu antara pembebasan atau peta. Jawabnya harus lebih dulu peta. Setidaknya peta dan pembebasan harus tahun yang sama," ujarnya.

Sementara itu Sofian Siregar SH, PH terdakwa Malidin mengatakan, salah seorang saksi Munardi yang saat itu menjabat Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan di BPN Kota Bengkulu menerangkan peta lokasi tidak bisa dijadikan dasar sebagai alas hak. Namun peta lokasi ini merupakan perencanaan dalam pembebasan lahan.

"Maksudnya peta lokasi itu proses, bukan hasil. Peta itu dibuat dalam perencanaan pembebasan. Jadi masih dimungkinkan peta yang dibuat riil dibebaskannya lahan tersebut tidak sama dengan peta itu," ungkapny.

Tambahan Sofian dari keterangan Kepala BPKAD Kota Bengkulu Arif Gunadi menyatakan kalau objek itu tidak terdaftar di simda aset. Dicontohkan Sofian, Rumah Sakit Harapan dan Doa, saat pembebasan belum ada simda aset, namun RS HD sudah masuk dalam Simda aset. "Kami selaku PH sudah mengungkap fakta sebenarnya seperti apa. Putusan nanti seperti apa, kita kembalikan kepada majelis hakim," pungkaskan Sofian. (wij)

Terbukti Berencana, Penjara Seumur Hidup

Pembunuhan Sadis Karena Utang Ditagih

BENTENG - Terdakwa pembunuhan, Deni Sutoyo (35) warga Desa Srikunoro Kecamatan Pondok Kelapa bakal menghabiskan hidupnya dalam penjara. Bagaimana tidak, majelis hakim PN Agra Makmur belum lama ini dalam amar putusannya menyatakan Deni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terhadap korban Ratiwan. Terjadi 11 Februari 2020, yang dilatarbelakangi masalah pelaku berutang dengan korban.

Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Deni, sebagai pelaku tunggal pembunuhan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Kajari Benteng, Dr. Lambok Marisi Jacobus Sidabutar melalui Kepala Seksi Pidum, Radiman, SH kepada RB atas hasil sidang yang digelar Senin (14/12) lalu. Radiman mengatakan, putusan majelis hakim sesuai dengan tuntutan JPU Kejari Benteng. "Terdakwa sejak penyidikan Polres Benteng memang mengakui ia memang telah merencanakan pembunuhan terhadap Ratiwan. Dilakukannya dengan menembaki korban menggunakan senapan angin dan menggorok leher korban dengan sebilah parang," jelasny.

Dia menambahkan terdakwa diberikan kesempatan hakim untuk berpikir apakah langsung menerima putusan tersebut atau mengajukan banding. Diberi waktu selama satu minggu sejak putusan dibacakan 14 Desember lalu. "Jika terdakwa melakukan banding, sudah pasti kita (Kejari Benteng) juga mengajukan banding, hingga vonis yang dijatuhkan tetap penjara seumur hidup," tegasnya.

Untuk diketahui, pembunuhan berencana ini terjadi setelah terdakwa memiliki utang Rp 115 juta dengan korban merasa kesal dan sakit hati karena selalu ditagih korban. Dimana uang tersebut sebelumnya akan digunakan untuk pembuatan bisnis roti, namun sayangnya bisnis tidak kunjung berjalan dan uang korban terlanjur habis digunakan pelaku. "Karena tidak senang ditagih terus menerus, makanya terdakwa berniat melakukan pembunuhan terhadap korban. Disini sudah masuk unsur berencananya. Awalnya pelaku melakukan upaya pembunuhan pada 10 Februari. Dia menjemput korban dengan menggunakan mobil, mengajak korban jalan-jalan. Tetapi pada saat itu terdakwa mengurungkan niat membunuh dan mengantar korban kembali ke tokonya," ungkap Radiman.

Sambung Radiman, pada 11 Februari terdakwa kembali mengajak korban bertemu di kawasan Desa Srikunoro. Dalih uang yang diminta korban telah dibawa dan diminta segera diambil. Setiba di lokasi, terdakwa bermodus seakan-akan mengajarkan ilmu sulap kepada korban. "Kemudian korban yang percaya dengan terdakwa mengikuti kemauan dan instruksi dari terdakwa tersebut untuk menutupkan mata. Kemudian dengan mudahnya terdakwa dari arah belakang menembakkan senapan angin dan menggorok leher korban hingga tewas," pungkasnya. (jee)

Jelang Putusan Hakim, Kembalikan Rp 21 Juta

Mantan Kadis Dituntut JPU

MUKOMUKO - Terdakwa korupsi Dana Desa (DD) Bukit Harapan Kecamatan Air Rami, Bambang Hirmanto sepertinya menyadari akan beratnya tuntutan yang dihadapinya. Sehingga Kepala Desa (Kades) Bukit Harapan Kecamatan Air Rami periode 2013-2019 ini memilih mengembalikan Kerugian Negara (KN) atas perkaranya itu sejumlah Rp 21 juta.

Sehingga total KN yang sudah dititipkan terdakwa sejumlah 47,7 juta. Sebelum perkara ini naik ke Pengadilan Tipikor Bengkulu, Bambang sudah menitipkan uang Rp 26,7 juta. Dengan demikian BH masih wajib mengembalikan KN sekitar 47,4 juta lagi. Sebab total KN hasil penghitungan auditor, sejumlah Rp 95,1 juta.

"Alhamdulillah, yang bersangkutan sudah kembali Rp 21 juta lagi. Tinggal menyisakan KN sekitar Rp 47,4 juta," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Andi Setiawan, SH kepada RB, kemarin (16/12).

Bila tidak ada aral melintang, sesuai jadwal, sidang hari ini pembacaan amar putusan majelis hakim untuk menentukan nasib Bambang selanjutnya. "Insya Allah jadi, besok (hari ini) sidang putusan di Bengkulu (PN Tipikor, red)," sampai Andi.

Pada agenda tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mukomuko meminta putusan majelis hakim menghukum ter-

dakwa pidana kurungan penjara setahun empat bulan. Juga membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsidiar (diganti) hukuman tambahan kurungan tiga bulan bila tak mampu membayar. Tidak hanya itu, JPU juga menuntut pelunasan KN. Yang jika itu tidak dilakukan, maka terdakwa harus menggantinya dengan menjalani tambahan masa hukuman kurungan selama delapan bulan penjara.

"Tuntutan JPU sesuai dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan di persidangan. JPU yakin terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor)," sampai Andi.

Sementara itu untuk perkara Tipikor dengan terdakwa Heri, mantan Kepala Dinas Pertanian Mukomuko juga akan kembali bersidang hari ini. Dengan agenda pembacaan tuntutan JPU. "Besok (hari ini), untuk perkara dengan terdakwa HP, agendanya tuntutan," ujar Andi.

Langkah ini setelah seluruh saksi-saksi yang didaftarkan dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Termasuk kata Andi, saksi ahli pun sudah dilakukan pemeriksaan.

"Kamis lalu juga sudah dilaksanakan pemeriksaan terdakwa. Jadi Kami besok (hari ini) sudah masuk ke tuntutan JPU," kata Andi yang enggan membocorkan tuntutan yang akan disampaikan hari ini. (hue)

Lintas

Tambah Lagi 17 Kasus

ARGA MAKMUR – Kasus Covid-19 di Bengkulu Utara bertambah lagi. Kemarin BU menerima data 17 kasus baru positif Covid-19. 17 orang ini merupakan sampel swab yang dikirimkan dari 4 Desember atau sebelum waktu pemungutan suara pilkada 9 Desember lalu.

Data terdapat RB, warga yang saat ini dinyatakan positif Covid-19 diketahui datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan 9 Desember lalu. Suhu tubuhnya juga di bawah 37,3 derajat sehingga tidak menggunakan bilik khusus dalam pencoblosan.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan BU, Ujang Ismail, SKM, M.Ph menjelaskan 17 kasus ini bukanlah klaster Pilkada. Sebab sampel swab mereka dikirimkan sebelum hari pemungutan suara.

Namun ia mengakui diantara 17 kasus tersebut ada anggota KPPS yang sebelum pelaksanaan tugas pemungutan suara yang bersangkutan sudah tidak lagi bertugas. Anggota KPPS ini saat rapid test hasilnya reaktif, kemudian dilakukan tes swab dan hasilnya keluar positif Covid-19. "Namun mereka sudah mengundurkan diri dan tidak bertugas sebagai KPPS," terangnya.

Dengan penambahan 17 kasus tersebut, Satgas Covid-19 kemarin melakukan tracing kontak erat selain keluarga dekat. Hal ini untuk mengantisipasi telah terjadinya penularan dari kontak erat.

"Kita akan mulai melakukan tracing. Warga yang dinyatakan positif juga sudah kita minta isolasi, baik mandiri maupun di rumah sakit," jelas Ujang.

Saat ini kasus Covid-19 di BU menjadi 164 orang. Penambahan besar terjadi dalam dua bulan belakangan ini bersamaan dilakukan pelonggaran kegiatan masyarakat. (qia)



KONFERENSI: Bupati BU, Ir. Mian dan Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi saat menghadiri Konferensi PGRI BU, Rabu (16/12).

45 CPNS Dilantik

ARGA MAKMUR – Sebanyak 45 CPNS yang dinyatakan lulus sudah menerima pembekalan dari Sekda BU, Dr. Haryadi, MM, M.Si. Hari ini, mereka akan dilantik oleh Bupati BU untuk diangkat sebagai CPNS di jajaran Pemkab BU.

Sekda mengingatkan pada 45 orang tersebut untuk mempelajari dan patuh pada aturan yang terkait kepegawaian. Ia menegaskan setelah diangkat sebagai CPNS ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. "Pelajari aturan tentang kepegawaian, pahami apa yang dilarang dan wajib dilakukan sehingga paham betul apa yang menjadi tugas," tegasnya.

Haryadi menjelaskan setelah dilantik sebagai CPNS, maka harus menjadi contoh pada masyarakat. CPNS juga tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan politik dan hal-hal tercela lainnya yang bisa berbuah sanksi kepegawaian. (qia)

Jaga Kualitas Belajar Online

ARGA MAKMUR – Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir. H Mian berterima kasih pada seluruh keluarga besar guru yang sudah terus berupaya memberikan pendidikan pada siswa di tengah pandemi Covid-19. Apalagi saat ini seluruh sekolah di BU memberlakukan belajar online karena masih dalam pandemi Covid-19.

Hal ini diungkapkan Mian dalam Konferensi PGRI Kabupaten BU, kemarin (16/12). Ia mengatakan belajar secara online tentunya berdampak pada kualitas siswa. Namun guru-guru di BU sudah bekerja keras untuk menjaga kualitas siswa dalam men-

erima materi ajar selama belajar online. "Saat ini anak-anak kita belajar secara online, para guru di BU sudah sangat bekerja keras. Kita harus terus menjaga kualitas pendidikan di BU," kata Mian.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu yang juga Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menyatakan guru merupakan garda terdepan pendidikan di suatu wilayah. Peran Pemkab BU sudah sangat mendukung semua kegiatan dalam dunia pendidikan dan guru. "Ke depannya pengurus PGRI terpilih tentunya harus bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam

dunia pendidikan dan guru," katanya. Tak hanya soal pendidikan, ia mengingatkan guru-guru dan PGRI di BU untuk terus menjaga kekompatan guru. Sehingga PGRI bukan hanya menjadi organisasi sebagai motor pendidikan di daerah, namun juga menjadi rumah besar yang mengayomi seluruh anggotanya.

"Kekompakan seluruh pengurus harus terus terjaga sehingga PGRI benar-benar menjadi rumah besar bagi anggotanya," harapnya. Haryadi juga mengatakan Pemkab BU terus menjaga hak-hak guru terutama fasilitas dan tunjangan bagi

guru. Saat ini sudah 80 persen lebih sekolah-sekolah di BU sudah dalam kondisi baik dan tidak ada lagi sekolah terpencil. "Ini tentunya bentuk perhatian pemerintah. Sehingga PGRI dan pemerintah harus terus bekerjasama," ujarnya.

Dalam Konferensi PGRI kemarin, Suyanto, M.Pd yang sudah dua periode menjadi Ketua PGRI BU kini menjadi pengurus di PGRI Provinsi Bengkulu. Sementara dalam Kusno, M.Pd terpilih sebagai Ketua PGRI BU yang baru. Kusno saat ini menjabat sebagai Kabid SMP di Dinas Pendidikan BU. (qia)

Kusno Pimpin PGRI BU

PGRI Bengkulu Utara (BU) kembali melakukan proses demokrasi dalam pemilihan kepengurusan, kemarin (16/12). Kabid Dispendik BU, Kusno, M.Pd terpilih sebagai Ketua PGRI BU dalam Konferensi PGRI Kabupaten BU. Acara ini dihadiri Bupati BU, Ir. Mian, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu yang juga Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si. Acara digelar di Gedung Guru BU. (qia)



PIDATO: Bupati BU, Ir. H Mian dan Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi, MM, M.Si saat menyampaikan sambutan dalam konferensi, Rabu (16/12).



PENGARAHAN: Suyanto, M.Pd yang dua periode menjabat Ketua PGRI BU kemarin melepas jabatannya dan menduduki jabatan Wakil Ketua di PGRI Provinsi Bengkulu.

FOTO BERSAMA: Bupati BU Mian, Dr. Haryadi dan para undangan saat berfoto bersama pengurus PGRI BU yang sukses melaksanakan konferensi kemarin

ADD Naik, Khusus Biaya BPJS Perangkat Desa

ARGA MAKMUR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) BU, Ir. Budi Sampurno menerangkan Pemkab BU sudah menyiapkan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Jumlahnya naik dari Rp 76 miliar tahun ini menjadi Rp 81 miliar untuk tahun 2021.

Budi mengatakan ADD hanya untuk penghasilan tetap (Siltap) atau gaji kepala dan perangkat desa dan dibiayai APBD. Tahun ini Pemkab BU menaikkan ADD dengan pertimbangan fasilitas jaminan kesehatan bagi perangkat desa.

"Tahun lalu perangkat memba-

yar sendiri untuk biaya jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan, tahun depan semuanya kita bayar melalui ADD," terangnya.

Pemkab BU sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembiayaan BPJS Kesehatan bagi perangkat desa tersebut, dan diperbolehkan. Sehingga tahun ini Pemkab BU memberikan jaminan kesehatan bagi perangkat desa. "Perangkat desa tidak perlu lagi menggunakan uangnya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Tahun depan ditanggung sepenuhnya oleh ADD," jelas Budi.

Selain BPJS Kesehatan, Pemkab

BU juga menganggarkan untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga perangkat desa bisa benar-benar tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan jaminan kesehatan oleh pemerintah. "Kita biayai dua BPJS sekaligus bagi perangkat desa. Mulai dari Sekdes hingga perangkat desa terbawah di tingkat dusun. Ini bentuk perhatian dari pemerintah bagi perangkat desa," tegasnya.

Selain memberikan ketenangan bagi perangkat desa dalam bertugas, Pemkab BU juga menjalankan target di atas 95 persen warga pemegang jaminan kesehatan. (qia)



HEARING: DPRD dan Pemkab BU menggelar hearing membahas Raperda Jamkesda yang merupakan inisiatif dewan.

Masih Ada Warga Miskin Belum Dapat Jamkes

ARGA MAKMUR – Pemkab dan DPRD BU melaksanakan hearing membahas Raperda Jamkesda yang menjadi raperda inisiatif DPRD BU, kemarin (16/12). Dalam hearing tersebut dijelaskan raperda akan menjadi payung hukum bagi seluruh masyarakat terutama yang kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi I DPRD BU, Febr Yurdiman menuturkan meskipun ada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBN dan program

Jamkesda yang dibiayai APBD, masih ada warga BU yang belum memegang BPJS Kesehatan, terutama warga yang tergolong kurang mampu.

"Setelah perda ini disahkan, seluruh masyarakat kurang mampu akan mendapatkan BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung pemerintah maupun swasta," terangnya.

Dalam raperda tersebut bukan hanya APBD yang bisa menanggung BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Namun pembiayaan BPJS Kesehatan

masyarakat kurang mampu bisa dibiayai oleh perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP).

"Program TJSLP juga sudah ada perda sebagai payung hukumnya. Ke depannya TJSLP juga bisa berupa pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu," jelas Febr.

Setelah hearing kemarin, dewan tinggal menggelar rapat paripurna dengan agenda kata akhir dari Pemkab BU terkait raperda inisiatif tersebut. (qia)

TELEPON PENTING

RSUD Tais	(0736) 91285
PLN	Tais (0736) 91291
Polres Seluma	081373849882
Kantor BPBD/PBK Seluma	(0736) 7391000

Pejabat Perkim Positif, 99 Orang Diswab Masal

SELUMA - Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma berduka dengan meninggalnya salah satu pejabat di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Pejabat berinisial Jk (42) menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin (14/2) lalu sekitar pukul 23.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais.

Pasca meninggalnya Jk, Tim Gugus Tugas menerima hasil swab yang menyatakan positif Covid-19. Untuk itu, langsung dilakukan tracking massal dengan menggelar swab tes terhadap seluruh kontak pasien pada Rabu (16/12) pagi.

"Iya, hari ini kita melakukan swab tes terhadap kontak pasien dari pihak keluarga almarhum dan dari Pemkab," sampai Direktur RSUD Tais, dr Wiwin Herwini melalui Kabid Pelayanan, Sulaiman SKM.

Dikatakan Sulaiman, swab ini setidaknya dilakukan terhadap sekitar 99 orang yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat almarhum. Serta juga ditambah dari pihak Pemkab Seluma terutama para pejabat ataupun rekan kerja yang pernah kontak dengan pasien. Setidaknya ada sebanyak kurang lebih 8 tenaga analis dan dibantu oleh perawat dari RSUD Tais yang melakukan swab tes di depan bangunan IGD tersebut.

"Untuk hasilnya kita masih menunggu, mungkin dalam waktu dekat ini," terangnya.

Usai dilakukan pengambilan sampel swabnya, 99 orang tersebut juga diwajibkan untuk menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Isolasi itu dilakukan hingga nantinya hasil pemeriksaan swabnya keluar. Hal tersebut menghindari dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Seluma.

"Kita imbau kepada mereka yang telah melakukan swab dapat menjalani isolasi mandiri, sampai hasil swab mereka keluar," imbaunya.

Terkait dengan masih adakah pengambilan sampel swab yang nantinya masih akan dilakukan oleh pihak RSUD Tais, menurut Sulaiman masih akan dilakukan. Mengingat, masih banyak beberapa ASN maupun tenaga honorer Pemkab Seluma yang masih belum dilakukan swab. Terlebih lagi pada ASN ataupun tenaga honorer yang bekerja di Dinas Perkim Kabupaten Seluma.

Bahkan pihak keluarga, kerabat ataupun tenaga pasien yang sempat kontak. Ini lantaran JK sendiri dimakamkan tanpa prosedur atau protokol kesehatan (Prokes) pada Selasa (15/12) pagi lalu. (cup)

TPG Tahun 2020, Hanya Dibayar 11 Bulan

SELUMA - Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau biasa disebut tunjangan sertifikasi untuk 1.126 guru selama tahun 2020 ini, hanya dibayarkan 11 bulan saja. Sementara satu bulan lagi, yakni bulan Desember yang masuk ke triwulan ke IV akan dibayar pada 2021 mendatang.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk pembayaran sertifikasi yang diterima dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tidak sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Sehingga sesuai anggaran tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Seluma baru akan memproses pembayaran dua bulan tunjangan sertifikasi pada triwulan ke IV ini. Yang mana, untuk sisanya nanti akan disalurkan pada tahun 2021 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, Emzaili Hambali M.Pd mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan sertifikasi 1.126 guru itu sebesar Rp 13 miliar. Namun oleh Kemenkeu RI hanya ditransfer sebesar Rp 10, 2 miliar saja. Sehingga sesuai anggaran yang ditransfer tersebut, pihaknya hanya bisa melakukan pembayaran dua bulan saja untuk tunjangan sertifikasi tersebut.

"Anggaran yang ditransfer dari pusat memang tidak mencukupi, sehingga pembayaran sertifikasi hanya cukup untuk dua bulan saja, nanti sisanya akan dibayarkan 2021 nanti," sampainya.

Emzaili mengatakan dengan tertundanya satu bulan pembayaran tunjangan sertifikasi TW IV ini diharapkan dapat diterima dan dimaklumi oleh para guru penerima. Yang mana untuk sisa satu bulan pada triwulan ke IV yang tertunda ini tetap akan dibayarkan di tahun 2021. Sehingga dirinya menyampaikan bahwa bukan tidak dibayarkan namun tertunda.

"Ini bukan tidak dibayarkan, akan dilunasi di tahun 2021 nanti," lanjutnya.

Emzaili mengharapkan tertundanya satu bulan pembayaran TPG TW IV ini tidak mengurangi kinerja guru penerima sertifikasi ini. Dirinya mengharapkan kinerja guru bisa tetap fokus dan maksimal dalam melaksanakan Tupoksinya. Yaitu maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai bidang dan tugasnya. Apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini.

"Kita harap ini tidak menurunkan kinerja para guru, tetap bekerja maksimal sesuai dengan bidang tugas yang telah diamanahkan," pungkasnya. (cup)



MENIPIS: Ketersediaan bufferstock logistik bencana yang telah menipis di gudang Dinsos Seluma.

12 Desa Tak Cairkan DD

PMD Beri Waktu Pelengkapan Berkas

SELUMA - Batas akhir pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sudah selesai pada tanggal 15 Desember lalu. Namun masih ada 12 desa yang belum melakukan pencairan. Alasannya karena belum melengkapi berkas pengajuan pencairan ADD.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Seluma memberikan waktu tambahan untuk melengkapi berkas pengajuan tersebut. Jika telah dilengkapi, Dinas PMD Seluma akan langsung mengeluarkan rekomendasi pencairan.

Plt Kepala Dinas PMD Seluma, Drs Agus Jun Fadhillah membenarkan hal tersebut. Tercatat dari pengajuan 180 desa masih ada 12 desa yang belum mengajukan pencairan ADD. Sedangkan untuk DD sudah 100 persen yang telah mengajukan dan telah

dikeluarkan surat rekomendasi pencairannya.

Untuk itu, pihaknya saat ini memfokuskan pengeluaran rekomendasi pencairan apabila ada desa yang mengajukan pencairan ke Dinas PMD Seluma. Tentunya apabila pengajuan tersebut dengan berkas yang lengkap. Dikarenakan ke 12 desa itu sudah mengajukan namun berkasnya tidak lengkap, maka pihaknya memberikan toleransi perpanjangan waktu.

Sedangkan untuk DD sendiri, pengajuannya sudah 100 persen yakni sebanyak 182 desa. "Iya sudah tutup tanggalnya seharusnya, bagi desa yang sudah mengajukan tapi masih ada kesalahan input data dan kekurangan data maka ada toleransinya, jadi diberikan waktu beberapa hari kedepan untuk memperbaiki dan melengkapinya," sampai Agus.

Agus menambahkan, pihaknya meminta agar desa-desa yang belum mendapatkan rekomendasi pencairan agar segera mengurusnya. Hal ini dikhawatirkan

anggarannya sudah tutup buku dan desa tersebut tidak dapat melakukan pencairan dan dipastikan ADDnya akan menyisakan Silpa anggaran.

"Kita minta untuk segera dilengkapi, jangan lama-lama," lanjutnya.

Sementara itu, hingga saat ini terdapat dua desa yang sama sekali belum melakukan pencairan anggaran dana desa (ADD) sejak Januari lalu. Dua desa itu ialah Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo di Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM). Pihaknya bahkan telah melakukan koordinasi langsung ke Dirjen Bina Pembinaan Desa beberapa waktu lalu.

Hanya saja, sampai saat ini persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan. Sehingga dipastikan ADD di dua desa tersebut tidak bisa disalurkan pada tahun 2020 ini. Hal ini akibat polemik perangkat desa yang terjadi dua desa itu.

"Untuk yang dua desa itu sama sekali tidak bisa dicairkan," pungkasnya. (cup)



DIRIKAN: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Seluma mendirikan pojok baca digital di kantor Bupati Seluma, kemarin.

Dirikan Pocadi, Tingkatkan Literasi

SELUMA - Untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Seluma memasyarakatkan literasi perpustakaan.

Hal ini dilakukan dengan memasang Pojok Baca Digital (Pocadi) di salah satu sudut ruangan di kantor Bupati Seluma. Dengan harapan minat baca masyarakat tak hanya meningkat secara kualitatif namun juga secara kuantitatif.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Rosdiana SSos MSI melalui Kabid Perpustakaan, Rozali SE menyampaikan bahwa Pocadi ini merupakan Program Perpustakaan Nasional yang sedang digalakkan. Kehadiran

perpustakaan dengan paradigma baru bukan lagi sekedar mengelola koleksi bahan bacaan tetapi menyampaikan pengetahuan agar dapat membawa masyarakat lebih sejahtera. Pendirian Pocadi ini setelah Kabupaten Seluma menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional RI. Lantaran memang membaca menjadi salah satu cara yang bisa dimaksimalkan sehingga masyarakat memiliki kedalaman literasi.

"Seluma menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional, pendirian Pocadi ini untuk memasyarakatkan literasi," ujarnya. Dirinya menambahkan, penyediaan pojok baca diharapkan dapat memberikan edu-

kasi secara langsung kepada masyarakat. Ditambahkannya, hal tersebut dapat melahirkan kebiasaan gemar membaca bagi masyarakat sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kedepan pihaknya akan terus melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Pocadi tersebut guna meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk membaca.

Selain itu, juga kemungkinan kedepan akan mendirikan Pocadi di lokasi lain maupun di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. "Ini harapan kita, mari kita budayakan membaca karena banyak ilmu yang bisa diserap dan didapatkan," pungkasnya. (cup)

Bufferstock Logistik Menipis, Dianggarkan 2021

SELUMA - Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan persediaan bufferstock (stok penyangga) logistik bagi para korban bencana, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Seluma telah melakukan pengajuan. Pengajuan itu sendiri baru akan dilakukan pada tahun anggaran 2021 nanti.

Mengingat penyaluran bantuan logistik merupakan tugas pokok yang dilaksanakan Dinsos Seluma. Sehingga jika terjadi bencana yang besar pada tahun ini, bantuan tersebut tidak akan cukup untuk menampungnya. Mengingat saat ini ketersediaan bufferstock logistik yang ada digudang hanya sedikit.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Herman SSos melalui Kabid Perlindungan Jamsos dan Rehabilitasi, Aziman SE membenarkan hal tersebut. Yang mana memang saat ini untuk stocknya masih tersedia digudang. Namun, stock itu hanya mampu untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana biasa hingga akhir tahun nanti.

Lantaran ketersediaannya sudah sangat minim sekali dan anggaran penambahannya pada tahun ini telah habis.

Bahkan, cadangan bufferstock logistik dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI juga sudah kosong.

"Iya masih ada, tapi ya tidak banyak, kalau untuk bencana biasa masih bisa tercover, tapi jika bencana banjir besar seperti waktu itu sudah tidak mampu lagi," sampainya.

Dirinya menambahkan, rencananya bufferstock itu akan kembali ditambahkan pada awal tahun 2021 nanti. Mengingat pihaknya telah menanggarkan dalam APBD 2021 sebesar Rp 40 juta. Hal ini untuk persiapan apabila terjadinya bencana sewaktu-waktu. Bentuk bantuan logistik ini mulai dari makanan cepat saji, makanan anak, peralatan memasak, pakaian dan lainnya.

Maka dari itulah untuk sebagai bentuk antisipasi terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu, pihaknya terus memastikan ketersediaan stok bantuan logistik. Stok itu sendiri disimpan di gudang logistik Dinsos Seluma.

"Untuk 2021 nanti kita usahakan ini yang paling awal kita sediakan, karena memang penting, 2021 nanti ada anggarannya," pungkasnya. (cup)

Ingatkan Prokes dan Imunitas Tubuh

SELUMA - Angka kasus positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Seluma mengalami peningkatan. Melihat hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma mengingatkan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit penyerta agar tidak kelelahan. Selain itu juga diingatkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menerapkan protokol kesehatan. Juga untuk memeriksakan kesehatan apabila telah melakukan perjalanan keluar daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Rudi Syawaludin SSos membenarkan bahwa memang saat ini sedang terjadi peningkatan kembali kasus covid-19. Itu diduga disebabkan oleh kembali melemahnya disiplin protokol kesehatan dan juga faktor imunitas tubuh masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta agar masyarakat kembali menggiatkan penerapan protokol kesehatan dalam beraktifitas.

Seperti menggunakan masker yang benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Juga tak lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat.

"Kita minta demikian, jangan longgar untuk menerapkan protokol kesehatan, juga jangan lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh," sampai Rudi.

Rudi menambahkan, meningkatkan imunitas tubuh bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang tinggi protein, perbanyak sayur dan buah terutama vitamin c dan vitamin e. Tak lupa juga untuk berjemur dipagi hari serta beristirahat yang cukup. Selain itu, juga diminta agar masyarakat yang telah melakukan perjalanan keluar daerah agar melakukan pengecekan kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi tertularnya virus corona. Pengecekan itu bisa dilakukan dengan rapid tes.

"Juga kita minta yang memang ada urusan keluar daerah sepulangnya nanti untuk bisa melakukan pengecekan, rapid tes," lanjut Rudi.

Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, SIK meminta masyarakat untuk sementara waktu tidak menggelar kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. (cup)

INFO HOTEL



HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX / HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Triburata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	Jl. Bakti Husada No. 88 Kel. Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	Jl. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

Resepsi Pernikahan Dilarang Pakai Prasmanan

Cegah Covid, Takziah Juga Dilarang

KOTA MANNA - Pemkab Bengkulu Selatan (BS) memastikan selama masa pandemi covid-19 akan ada kebijakan baru bagi penanganan kerumunan massa, khususnya di hajatan pernikahan maupun takziah

kegiatan yang diperketat oleh pemerintah daerah. Penanganan pandemi Covid -19 di Kabupaten BS kembali menjadi skala prioritas pemerintah daerah, sebab tahun depan ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kabupaten, salah satunya penanganan kerumunan massa seperti

resep pernikahan dan takziah kematian. Langkah tegas yang diambil nantinya, pemerintah daerah bersama gugus tugas akan menyesuaikan resepsi pernikahan dengan aturan terbaru, salah satunya tidak diperkenankan untuk menggelar prasmanan dan organ tunggal. Sementara khusus untuk hajatan

duka, Pemkab BS tidak akan memberi izin kepada penyelenggara ataupun ahli rumah. Hal ini ditegaskan oleh Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM, dikatakannya untuk kerumunan massa memang menjadi perhatian sendiri. Sehingga beberapa kebiasaan masyarakat selama ini yang mengumpul-

kan orang banyak akan ditiadakan lagi. "Pemerintah bersama gugus tugas akan membuat kebijakan baru. Khusus untuk pesta pernikahan dan takziah yang sifatnya mengumpulkan orang banyak akan diperketat lagi," jelas Gusnan. Karena jika tidak ada ketegasan maka dikhawatirkan

angka penularan Covid di BS bisa meledak. Terlebih lagi sudah ada empat orang pasien yang meninggal karena diduga terkonfirmasi Covid -19. Sementara itu, Ketua DPRD BS Barli Halim, SE, MM menuturkan, kebijakan untuk penanganan Covid juga sudah diatur di APBD tahun 2021 mendatang.

Namun untuk besaran alokasi anggaran penanganan Covid -19 tahun 2021 mendatang, pihaknya tidak bisa memastikan besaran dana yang akan digelontorkan. "2021 fokus penanganan Covid, ini sudah dibicarakan dengan pihak eksekutif. Soal perketat aturan itu sangat kami dukung," ujar Barli. (tek)

Bupati Minta Partisipasi Masyarakat

KOTA MANNA - Mengaku tidak bisa bekerja sendiri, Bupati Gusnan Mulyadi mengharapkan partisipasi dan dukungan masyarakat apabila telah dilantik oleh sebagai bupati Bengkulu Selatan (BS) periode 2021-2025. Ini disampaikan Gusnan saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten kemarin (16/12).

Melalui diskusi tersebut, Bupati berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar memberikan partisipasi aktif dan memberikan masukan terhadap RPJMD Tahun 2021-2025. Disampaikan Bupati, penyusunan RPJMD ini harus berkesinambungan dan mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Gusnan beralasan, sangat penting masukan dari berbagai unsur masyarakat sebagai upaya mematangkan rencana program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Disebutkan Gusnan setiap pembangunan harus sesuai dengan RPJMD. Dan Penyusunan RPJMD juga harus mengacu kepada visi misi pada saat pencalonan. Sehubungan dengan itu, Gusnan minta sumbang saran dari berbagai elemen masyarakat terkait penyusunan program pembangunan ke depan.

"Intinya pemerintahan kami siap menerima sumbangsah dan saran dari seluruh masyarakat," papar Gusnan.

Disebutkan Gusnan, sumbangsah dari masyarakat mulai dari program pelayanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perternakan, termasuk program Jamkesda, Bosda dan lain.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang BS, Sukarni menyebutkan bahwa FGD ini merupakan tahapan awal penyusunan RPJMD BS Tahun 2021-2025. "Benar kata bupati, masukan dan sumbang saran dari berbagai pihak sangat diharapkan," ujar Sukarni. (tek)



KETAT: Surat suara usai pleno tingkat kabupaten dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Tingkat Partisipasi Pemilih Lampaui Target Nasional

KOTA MANNA - Sehari setelah dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur beserta bupati-wakil bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) KPU memastikan tingkat partisipasi pemilih mencapai 85 persen dan angka tersebut menembus target nasional. Meski di tengah pandemi Covid-19, namun minat masyarakat di Kabupaten BS untuk menyalurkan hak memilih patut

diapresiasi, sebab dari total 177.552 Daftar Pemilih Tetap (DPT, KPU BS merilis ada 85 persen pengguna hak suara yang masuk dalam perhitungan pemilihan kepala daerah 09 Desember lalu. Sehingga dengan capaian tersebut, KPU BS berhasil melampaui target nasional sebesar 77,5 persen atau jika dikalkulasikan, jumlah pengguna suara sah mencapai 98.075 atau 85 persen. Komisiner KPU BS Aspiran Toni, SE mengatakan,

pihaknya sangat berterimakasih kepada seluruh kandidat calon gubernur-wakil gubernur dan bupati -wakil bupati beserta pihak-pihak lain yang sudah mendukung jalannya pesta demokrasi di Kabupaten BS. "Kalau target kita sebenarnya 80 persen dan itu ternyata melebihi artinya memang tingkat partisipasi masyarakat BS sangat tinggi dan masyarakat perlu diapresiasi untuk ini," terang Aspiran. Ditambahkan Ketua KPU BS

Alpin Samsen, S.Pt dengan rincian 85 persen tersebut Kabupaten BS menjadi kabupaten terbaik ketiga tingkat pemilihan tertinggi setelah Kabupaten Lebong dan Kaur. Tingginya partisipasi memilih ini disebutkan Alpin tidak lepas dari dampak perkembangan dunia digital dan juga peran aktif pihak penyelenggara dan para media. Dengan mudahnya akses ke internet membuat warga BS cepat mengetahui tahapan Pilkada. Bahkan berita hoax dan

lainnya dapat dengan mudah disaring oleh masyarakat. "Banyak yang menyebabkan partisipasi masyarakat meningkat, namun semua itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat akan proses demokrasi, artinya hak untuk memilih itu semakin tinggi," cetus Alpin usai pleno tingkat kabupaten. Diketahui hasil rapat pleno ini, petahana baik Gubernur dan Bupati BS berhasil menjuarai kontes Pilkada di Kabupaten BS. (tek)

Cegah Keramaian, Layanan WiFi Gratis Diputus

Di Taman Merdeka

KOTA MANNA - Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan yang bisa memicu penyebaran Covid-19, Pemkab Bengkulu Selatan (BS) memutuskan jaringan WiFi yang berada di lokasi wisata Taman Merdeka, Kota Manna. Upaya ini pun cukup manjur. Dimana saat ini Taman Merdeka sepi pengunjung.

Hingga saat ini kasus warga BS yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai 38 orang sejak April lalu. Berbagai cara dan sosialisasi terus dilakukan Pemkab agar masyarakat BS terhindar di penyebaran virus corona. Salah satunya mencegah warga untuk berkerumun di tempat umum. Taman Merdeka merupakan lokasi favorit masyarakat BS berkumpul di sore hari. Karena



PUTUS: Dinas Kominfo Bengkulu Selatan memutus jaringan WiFi gratis di Taman Merdeka, antisipasi kerumunan.

Taman Merdeka menyediakan layanan WiFi gratis 24 jam.

Oleh sebab itu Dinas Kominfo membuat langkah agar warga tidak berkerumun yakni dengan cara memu-

tus sementara jaringan WiFi agar tidak ada warga yang berkerumun. Langkah ini dinilai tepat, sebab meskipun diberikan tanda atau imbauan menjaga jarak di Taman Merdeka, hal

tersebut kurang dipatuhi oleh pengunjung, sehingga Kominfo memutuskan untuk menghentikan sementara layanan WiFi gratis bagi warga sampai covid-19 hilang di BS.

Kepala Dinas Kominfo BS Ir.Susmanto, MM mengatakan, pihaknya bukan bermaksud membatasi hak masyarakat agar menikmati layanan internet gratis. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu. Dia mengatakan keselamatan warga jadi prioritas Pemkab BS. "Kalau tidak diputus maka masyarakat atau dominan anak muda akan berkumpul. Sedangkan saat ini dilarang untuk berkerumun dimanapun dan kapanpun," jelas Susmanto.

Namun Susmanto berjanji pihaknya akan sesegera mungkin menyambungkan kembali layanan internet gratis di Taman Merdeka. Sebab dengan adanya layanan internet gratis tersebut banyak masyarakat yang terbantu mulai dari anak sekolah, pemuda hingga orangtua. (tek)

PAD Perikanan Bocor Ratusan Juta Rupiah

KOTA MANNA - Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) memastikan mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi pelelangan dan penyimpanan ikan hingga ratusan juta rupiah per ta-

hun. Sayangnya, belum ada upaya untuk menagih kepada pengguna jasa aset Dinas Perikanan di kawasan Pantai Pasar Bawah. Meskipun, Dinas Perikanan sudah mengakui bahwa setiap tahun OPD yang bergerak di sektor perikanan me-

ngalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dalam satu tahun.

Sebab, selama ini para pengguna jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maupun aset lainnya yang berada di kawasan Pantai Pasar Bawah selalu malas untuk

membayar jasa retribusi kepada Dinas Perikanan Kabupaten BS.

Maka dari itu, Dinas Perikanan Kabupaten BS kerap mengalami kerugian, bahkan dari data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten BS Novianto, M.Si, Dinas Perikanan kehilangan pendapatan hingga Rp 100 juta dalam satu tahun. Tentu hal ini menjadi perhatian serius pada tahun 2021 mendatang. Apalagi kabupaten BS mengalami penurunan dana transfer hingga Rp 119 miliar.

Sayangnya, untuk upaya penagihan, Dinas Perikanan Kabupaten BS belum bisa maksimal, karena menurut Novianto, alasan

pengguna jasa TPI dan gudang penyimpanan selalu mengalami kerugian. "Jadi selalu beralasan pengguna TPI itu mengalami kerugian. Untuk kepastian benar atau tidak akan kami cari tau," terang Novianto.

Ke depan, Dinas Perikanan Kabupaten BS akan mengatur kebijakan tersendiri untuk penarikan retribusi kepada pengguna jasa TPI maupun gudang penyimpanan dengan memberlakukan iuran bulanan tepat waktu. "Tetap akan kami maksimalkan lagi. Mungkin caranya akan berbeda dengan sistem penagihannya agar PAD BS kembali bertambah dari sektor Dinas Perikanan," ujar Novianto. (tek)

Jangan Coba-coba Permainkan Dana Desa

KOTA MANNA - Dengan adanya Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Bengkulu Selatan (BS) mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) di BS agar menggunakan DD dengan benar dan tidak bermasalah dengan hukum.

Tidak ingin ada Kades yang terpaut masalah hukum, Dinas PMD mewanti betul seluruh desa agar penggunaan desa harus jelas. Bahkan tahun 2021 Dinas PMD meminta setiap desa memasang spanduk yang berisikan rincian penggunaan DD. Ini dilakukan agar DD transparan dan tidak mengundang tanda tanya masyarakat. Dari 142 desa di BS Dinas PMD tidak pilih kasih apabila ada desa yang meminta bantuan soal pembangunan BS. Namun demikian, apabila ada desa terpaut masalah hukum soal DD, Kepala Dinas PMD Hamdan Syarbaini, S.Sos angkat tangan, sebab dia menyampaikan apa yang akan dilakukan desa itu harus jelas. Juga termasuk penggunaan DD, semuanya harus transparan tidak boleh ada yang menyimpang sedikitpun.

Disebutkan Hamdan, DD harus memberikan manfaat untuk desa tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Dan Kades diperingatkan agar tidak mencoba-coba mempermainkan dana desa. "Sejak awal dari tahun ke tahun desa terus diingatkan, Kades juga terus diingatkan agar tidak bermain dengan DD. Penggunaan DD harus transparan, mulai tahun depan setiap desa harus tampilkan penggunaan DD," ujar Hamdan.

Sehingga dengan proses transparan yang dilakukan oleh pihak desa, Hamdan meyakini tidak akan ada polemik di desa atau masalah DD. Oleh sebab itu apabila ada Kades atau pemerintahan desa yang bermain dengan DD, pihak PMD meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) BS usut tuntas. Agar menjadi pelajaran bagi desa lainnya dan pembangunan BS tidak terhambat. Sementara itu Kajari BS Nauli Rahim Siregar, SH, MH mengaku selama tahun 2020 ini terdapat dua desa yang saat ini dalam penyidikan Kejari. Dua desa itu yakni desa Kuripan Kecamatan Bunga Mas dan desa Air Umban Kecamatan Pino.

"Dua desa itu terkait masalah DD, kini masih dalam proses penyidikan untuk ditetapkan Kades nya sebagai tersangka," jelas Kajari. (tek)

DI JUAL RUKO 2 LANTAI
Lokasi Strategis
Lokasi: Jl. M.T. Haryono Penggantung, Kec. Ratu Samban, Ruko 2 tingkat di dekat simpang Sentiongo, Kota Bengkulu. UK. 3,7m x 14m Harga nego Minat Hub. April 0813 7347 7299

JUAL RUKO
Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Kompi Bengkulu (pas didepan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RIM Padang dan sebelah kanan warung Bakso
fasilitas : 1 kamar, kamar mandi, ruang masak, sumur bor & tedmon, cocok untuk usaha apa saja. Harga 360 juta nego Minat hubungi : 082179363606 / 082375706151

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas : 3 Kmrtidur, 1 R. Tarnu, 1 R. Tv/Keluarga, 2 Teras Muka dan Belakang, 1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagar Besi dan Tembok Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34 Kel. Padang Harapan Bkl Hubungi : 0878 9496 1917 0819 1931 8688 (Berminat silahkan cek lokasi)

LINTAS



SOSIALISASI: Dinkes Kaur saat menggelar sosialisasi dengan pihak sekolah kemarin.

Target Jadikan Sekolah Kawasan Tanpa Rokok

KOTA BINTUHAN - Dalam rangka menyesuaikan sekolah menjadi kawasan tanpa rokok (KTR), kemarin (16/12) Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menggelar kegiatan sosialisasi upaya berhenti merokok (UBM) di hotel Zalpa.

Kegiatan yang dihadiri oleh para guru dan pihak sekolah ini bertujuan agar guru memantau siswanya untuk tidak merokok. Karena saat ini pelajar di Kaur sudah banyak yang merokok dan menjadi perhatian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.

Apalagi berdasarkan peraturan pemerintah dari pusat sampai kabupaten Kaur saat ini sekolah harus bebas dari rokok. Dan menjadi kawasan tanpa rokok (KTR) untuk itu para guru harus mendukung dan menerapkan dengan melarang dan mengawasi setiap siswa dan orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk tidak merokok.

"Para guru juga harus mematuhi Perbup tentang KTR yang sudah disosialisasikan lama oleh Pemkab Kaur untuk tidak merokok di areal sekolah. Dengan tujuan agar sekolah menjadi wilayah yang KTR sama sekali. Untuk mewujudkan ini tentunya peran pihak sekolah khususnya guru sangat lah penting untuk menjadikan sekolah menjadi kawasan tanpa rokok di Kaur," kata Kabid P2P Dinkes Kaur Juli Haryanto kemarin.

Kendati Kaur telah memiliki Perda nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan merokok namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah terkait pelanggaran perda tersebut. Kendati sudah disosialisasikan namun sampai saat ini masih banyak PNS yang didapati merokok di ruang kerjanya. (cik)



PERBAIKAN: PLN saat memperbaiki jaringan yang putus.

Warga Keluhkan Listrik Sering Padam

KOTA BINTUHAN - Angin kencang disertai hujan yang terjadi saat ini mengakibatkan listrik di wilayah Kabupaten Kaur saat ini sering padam mendadak. Untuk itu warga Kaur diminta waspada, karena tidak hanya jaringan yang sering putus, namun juga mengakibatkan tiang listrik roboh. Bahkan dalam dua bulan ini sudah lebih dari tiga tiang listrik roboh ke jalan akibat angin kencang dan hujan.

Seperti yang terjadi kemarin, listrik di Kabupaten Kaur mengalami gangguan akibatnya pemadaman listrik cukup lama. Berdasarkan keterangan PLN Bintuhan listrik padam karena banyaknya jaringan yang gangguan akibat angin kencang. Mulai dari putus jaringan, tertimpa pohon dan juga banyak dahan dan pelepah kelapa yang menimpa jaringan tegangan tinggi.

"Saat ini kita terus berupaya menormalkan kembali jaringan pak, listrik agar kembali menyala. Namun karena banyaknya jaringan yang tertimpa dahan pohon saat angin kencang ini membuat listrik belum normal. Untuk itu kita minta warga melapor jika ada jaringan yang tertimpa pohon, dahan dan sebagainya agar bisa diperbaiki," terang Kepala PLN Bintuhan Novian Parlindo kepada RB.

Tidak hanya itu saja hujan yang terus mengguyur Kaur juga mengakibatkan beberapa tebing napal yang ada di Desa Tuguk Kecamatan Luas Kabupaten Kaur longsor. Kendati belum sempat menutupi jalan lintas Kaur Tengah-Luas dan Muara Sahung. Namun material longsor tersebut sudah mulai tergerus dan kalau hujan terus terjadi dapat mengakibatkan jalan menuju ke Kecamatan Luas dan Muara Sahung tertutup longsor nantinya.

Tidak hanya di Luas, longsor juga masih terjadi di wilayah Seranjang Kecamatan Semidang Gumay saat hujan seperti ini. (cik)



TUNTAS: Komisioner KPU Kaur menyerahkan hasil pleno kepada Bawaslu Kaur tadi malam, usai pelaksanaan pleno.

Jelang Akhir Tahun, 7 Pejabat Dimutasi

KOTA BINTUHAN - Jelang pergantian tahun 2020 ke 2021, Kepala Kemenag Kabupaten Kaur kembali melakukan rolling para pejabat utama di jajaran Kemenag Kaur dan juga KUA. Tidak hanya itu ada juga beberapa kepala MTsN, MIN dan KUA yang kembali dikukuhkan jabatannya semula. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kemenag Kaur Zainal Abidin kemarin (16/12).

Tujuh pejabat di jajaran Kemenag Kaur yang terkena rolling adalah Kasi Haji Mugiyem yang dipercaya sebagai Kasubag TU menggantikan posisi Arpan Efendi. Sementara Arpan dimutasi sebagai Kasi Pendidikan Agama menggantikan Bujang Ruslan. Dan Bujang Ruslan menggantikan posisi Mugiyem sebagai Kasi Haji. (lihat grafis)

Untuk pengembangan dan pengalaman sejumlah pejabat yang ada dengan mutasi ini diharapkan pejabat yang baru dilantik

ini dapat bekerja lebih baik lagi. Apalagi dalam mutasi kali ini semua jabatan sama dan hanya mengalami pertukaran saja untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berbeda.

"Mutasi adalah hal yang bisa, kita harapkan pejabat yang mutasi dan rotasi kali ini lebih baik lagi kedepannya. Lebih amanah dalam menjalankan tugas dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kaur," kata Kepala Kemenag Kaur Zainal Abidin.

Selain rolling ada juga beberapa kepala sekolah MTsN dan MIN yang kemarin dikukuhkan kembali jabatannya sebelumnya. Seperti Sarif Ahmad dikukuhkan kembali sebagai Kepala MTsN 2. Julita Kepala MTsN 1, H Yuserizal Guru MTsN 5, Jamila Kepala MIN 1. Elvi Marlanti Kepala MIN 2, Eda Yunita Kepala MIN 3 dan Sudarmi Kepala MIN 4. Kemudian Dandi Harjo dikukuhkan sebagai Kepala KUA Pagulu kembali. (cik)

MUTASI DI LINGKUNGAN KEMENAG KAUR		
NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
Mugiyem	Kasi Haji	Kasubag TU
Bujang Ruslan	Kasi Pendidikan Agama	Kasi Haji
Arpan Efendi	Kasubag TU	Kasi Pendidikan Agama
Sarif Ahmad	Kepala MTsN 2	Kepala MTsN 2
Julita	Kepala MTsN 1	Kepala MTsN 1
H Yuserizal	Guru MTsN 5	Kepala MTsN 5
Jamila	Kepala MIN 1	Kepala MIN 1
Elvi Marlanti	Kepala MIN 2	Kepala MIN 2
Eda Yunita	Kepala MIN 3	Kepala MIN 3
Sudarmi	Kepala MIN 4	Kepala MIN 4
Rafisman	Kepala KUA Tj Kemuning	Kepala KUA Semidang Gumay
Iwanto	Kepala KUA Semidang Gumay	Kepala KUA Tj Kemuning
Saugus M Pusda	Kepala KUA Luas	Kepala KUA Nasal
Salihin	Kepala KUA Nasal	Kepala KUA Luas
Dandi Harjo	Kepala KUA Pagulu	Kepala KUA Pagulu

Tersandung Korupsi, Kades Babat Dijabat Plh

KOTA BINTUHAN - Tidak semua desa di Kabupaten Kaur saat ini dijabat oleh Pelaksana harian (Plh) kades, khusus untuk desa-desa yang kadesnya meninggal dunia dan juga tersandung korupsi sampai saat ini masih dijabat oleh Plh. Kepastian ini disampaikan Kepala PMD Kaur Asmawi, S.Ag, MH kepada RB di ruang kerjanya kemarin.

Menurutnya desa-desa yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) adalah desa yang masa jabatannya habis dan harus ditunjuk plt yang boleh dijabat oleh sekdes PNS atau PNS di kantor camat atau Pemkab Kaur.

Sementara untuk desa-desa yang kadesnya meninggal dunia seperti di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning yang meninggal karena laka

lantas. Saat ini pemerintahan desa dijabat oleh Plh sementara waktu. Sementara dua kades lainnya seperti Kades Papahan Kecamatan Kinal dan juga Kades Babat Kecamatan Tetap. Yang tersandung korupsi saat ini pemerintahan desa tetap berjalan karena ada Plh kades.

"Terkait kades Babat yang belum putusan dari pengadilan terhadap kasus yang menjeratnya sampai saat ini. Untuk meneruskan pemerintahan desa kita tetap tunjuk plh untuk plt tidak ada. Kecuali kalau jabatan kades itu berakhir karena habis masa jabatannya. Dan di Kaur ini ada tiga jabatan kades yang dijabat oleh plt sampai saat ini," kata Kepala PMD Kaur Asmawi kepada RB.

Terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Kades Babat Kecamatan Tetap, pihak PMD Kaur mengatakan kalau kasus tersebut bukan kasus DD. Namun kegiatan pembangunan embung tahun 2019 dari KPDT sebesar Rp 320 juta. Kendati demikian untuk saat ini pihak PMD Kaur juga telah memberikan keterangan terkait persoalan ini kepada pihak Kejari Kaur.

Karena di Kaur ada dua desa yang mendapatkan bangunan embung tahun 2019 yang lalu. "Yang jelas untuk kasus Desa Babat itu bukan DD namun dana bantuan dari KPDT dan ini sudah kita sampaikan ke pihak Kejari Kaur," singkat Asmawi.

Untuk diketahui Kades Babat Kecamatan Tetap berinisial SR pada tanggal 10 Desember 2020 yang lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembangunan embung pada tahun 2019 sebesar Rp 320 juta. (cik)

Lismidianto - Herlian Tetap Unggul

Hasil Pleno KPU Kaur

KOTA BINTUHAN - Setelah berjalan cukup alot, pleno KPU Kaur yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB tadi malam akhirnya tuntas.

Berdasarkan hasil pleno KPU Kaur Paslon 02 Lismidianto - Herlian Muhrim tetap unggul dari paslon 01 Gusril Pausi dan Medi Yuliardi. Paslon 02 berhasil mendapatkan suara sebanyak 40.792 suara, sementara paslon 01 mendapatkan suara 37.148 suara. Hasil pleno KPU Kaur tadi malam tidak jauh berbeda dengan hasil pleno tingkat PPK yang telah dilakukan di 15 kecamatan yang ada di Kaur.

Dari hasil pleno tersebut diketahui jumlah surat sah sebanyak 77.940 suara. Sementara suara yang tidak sah sebanyak 1.284 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 79.224 suara dari jumlah DPT sebanyak 88.990 suara. Dengan tuntasnya pleno tersebut maka hari ini (17/12) KPU Kaur akan mengikuti pleno tingkat Provinsi Bengkulu.

Menarik dalam berita acara hasil pleno tadi malam tidak semua saksi menandatangani. Dari data yang di himpun RB, yang menandatangani hasil pleno hanya saksi paslon 02. Sementara saksi - saksi dari paslon 01 tadi malam tidak menandatangani hasil rapat pleno KPU Kaur.

Sementara saksi dari paslon 01, Almizi dan juga Simamora mengatakan ka-

lau pihaknya sengaja tidak menandatangani hasil pleno KPU Kaur. Karena banyak keberatan yang disampaikan saat pleno tidak diakomodir oleh Bawaslu dan juga KPU Kaur. Sehingga mereka tidak menandatangani hasil pleno KPU Kaur tadi malam.

Kendati demikian saksi 01 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga Pilkada Kaur berjalan aman dan lancar. "Kami sengaja tidak menandatangani berita acara hasil pleno karena keberatan kami tidak diakomodir. Untuk langkah selanjutnya kita belum tahu dan semuanya kita serahkan ke pada paslon," ungkap Almizi.

Terpisah salah satu saksi paslon 02 yaitu Okman mengaku sangat puas dengan hasil pleno KPU. D "Alhamdulillah selesai sesuai dengan kita harapkan dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat dan semua pihak sehingga pilkada sukses dan aman," pungkaskan Okman.

Sementara itu Ketua KPU Kaur, Meixxy Rismanto dalam sambutannya juga mengungkapkan terimakasih kepada semua pihak. Termasuk masuk TNI dan Polri yang telah mengawal dan mengamankan pilkada tahun 2020 dengan baik.

"Untuk penetapan dan lain sebagainya tentunya kita tunggu selesai pleno di KPU Provinsi Bengkulu nantinya. Dan sesuai dengan aturan yang ada," pungkaskan Ketua KPU Kaur Meixxy Rismanto kemarin. (cik)

Dikeroyok Saat Asyik Joget

KOTA BINTUHAN - korban pengeroyokan, Hasbullah (26) warga Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan melapor ke Polsek Maje. Korban tidak terima lantaran mengalami luka di bagian kepala lantaran dikeroyok oleh Bo (26) dan teman-temannya. Saat melapor korban mengaku kalau pengeroyokan tersebut terjadi pada Minggu (13/12) sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Wayhawang Kecamatan Maje.

Data terhimpun, malam itu korban pergi ke rumahnya yang ada malam itu bersama korban," ungkap Kapolsek Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kapolsek Maje Ipda Cahya P Tuhuteru. (cik)

korban ditegur oleh Bo dan meminta korban turun dari panggung dan berjoget di bawah panggung saja.

Saat itu korban turun dan sedang joget di datang pelaku dan memukul kepala sebelah kiri dan memancing korban. Saat terjatuh itu lah banyak teman pelaku yang datang juga memukul korban di acara tersebut.

"Untuk laporan sudah kita terima dan akan kita dalam lebih lanjut. Kita juga akan cek TKP dan para saksi lainnya yang ada malam itu bersama korban," ungkap Kapolsek Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kapolsek Maje Ipda Cahya P Tuhuteru. (cik)

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA
 Hubungi :
PT. TRI GADING MAKMUR
 Distributor Resmi Pelumas Pertamina
 Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
 Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
 Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOU'RE ENGINE
 PERTAMINA PELUMAS

SINAR HARAPAN ROOF
 GENTENG METAL ZINCALUME®
 Ready STOK

2 susun...?
 6 susun...?
 20 susun...?

Tidak Masalah...!!!
 Menyediakan Truss / Rangka Baja Ringan

* Kualitas Terbaik Dan Terjangkau
 * Ringan Dan Mudah Mengikuti Bentuk Atap
 * Anti Gempa Dan Angin Kencang
 * Jarak Reng Bisa di Atur Sesuai Dengan Keinginan Anda
 Sehingga Anda Dapat Menghemat Reng

Hubungi SINAR HARAPAN
 Jl. Kintibalu No. 87, Kebun Tebing - Bengkulu
 Phone (0736) - 21653, Hr. 0822 7838 6870

Partisipasi Pemilih Lampau Target Nasional



SAMSU AMANAH

PAW Golkar Tunggu Pleno KPU Selesai

BENGKULU - Pergantian Antar Waktu dua anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang berhenti karena maju mencalon dalam pilkada serentak 2020, saat ini masih berproses. Dua anggota dewan yang akan diganti tersebut yakni Imron Rosyadi dari Partai Golkar dan Edison Simbolon dari Partai Demokrat.

Sekretaris DPD Golkar, Samsu Amanah, S.Sos menyampaikan Partai Golkar akan melakukan rapat pleno membahas mengenai PAW tersebut setelah pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilgub Bengkulu selesai.

Berdasarkan jumlah suara ada tiga kandidat untuk mengisi PAW dari Golkar. Diantaranya Raharjo Sudiro, S. Sos dengan 4.083 suara, Sunandar S. Sos memiliki 2.541 suara, serta Malniarti, SE dengan 2.189 suara. Dimana ketiganya ini merupakan dapil Bengkulu Utara dan Benteng.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu, Suhardi mengatakan untuk penunjukan PAW Ketua Demokrat Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon saat ini masih dalam proses. Untuk kandidat calonnya, ia hanya menyebutkan nama Risman Sipayung dengan 1.119 suara dari Dapil Kota Bengkulu yang merupakan suara terbanyak setelah Edison Simbolon. "Sesuai dengan undang-undang suara terbanyak kedua itu yang menggantikannya. Makanya itu akan diverifikasi ke KPU betul apa tidak," ujarnya. (war)



Ruang Promosi Kuliner

Ruang Promosi Kuliner

BENGKULU - Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra S.Ag MM menyampaikan berdasarkan perhimpunan data sementara, dari pelaksanaan pilkada yang digelar 9 Desember 2020 lalu, angka partisipasi pemilih sudah melampaui target nasional.

"Untuk angka partisipasi dalam pilkada kali ini, kita sudah melampaui target angka nasional," kata Irwan.

Dijelaskannya, untuk data sementara ini dihimpun dari data yang sudah dilakukan di tingkat kecamatan. Dimana angka partisipasinya sudah di atas angka 80 persen. Sedangkan target nasional partisipasi pemilih pada pilkada ini hanya sebesar 77,5 persen.

"Jadi untuk sementara angka Golput kita sudah tidak sampai 20 persen lagi. Namun sekali lagi ini baru sementara, untuk hasil finalnya baru akan kita ketahui setelah hasil rekapitulasi di tingkat provinsi," jelas Irwan.

Sementara soal penyebab masih

cukup banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, menurut Irwan, banyak faktor. Diantaranya faktor cuaca, dan faktor lain yang menyebabkan pemilih enggan menggunakan hak pilihnya.

"Juga ada surat suara yang tidak sah. Itu bisa dilihat berapa suara tidak sahnya, baru selebihnya ada juga yang tidak hadir ke TPS, dan itu alasannya hanya pemilih sendiri yang tahu," tutup Irwan.

Partisipasi di Kota Turun

Partisipasi pemilih di Kota Bengkulu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Pemilu 2019. Ini disebabkan banyak faktor, salah satunya pandemi Covid-19. Selain itu di kota hanya menggelar Pilgub saja ditambah saat pemungutan suara diguyur hujan deras.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Bengkulu, Martawansyah M.Si. "Partisipasi pemilih kita di 62,79 persen, harus kita akui bila diband-

ingkan Pemilu 2019 lalu lebih rendah. Namun jika dibandingkan dari Pilgub 2015, hanya 49 persen, tidak sampai 50 persen. Pilwakot 2018 hanya 58 persen. Artinya bila kita lihat dari proses Pilkada, itu ada peningkatan. Namun bila dilihat dari Pemilu ya kita turun," beber Martawansyah.

Pleno Tingkat Provinsi

KPU Provinsi Bengkulu hari ini akan menggelar rapat pleno rekapitulasi dan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto menerangkan saat pleno penetapan penghitungan suara ini, dipastikan menggunakan pleno secara manual berjenjang yang akan dijadikan sebagai pedoman. Dimana dilakukan secara bertingkat mulai dari PPK hingga kabupaten/kota.

"Kita yakini untuk pleno di tingkat kabupaten tidak akan salah input.

Karena itu disaksikan oleh banyak pihak. Ada panwas, saksi," sam-painya.

Dijelaskannya, hingga Rabu (15/12), semuanya KPU Kabupaten/Kota sudah menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi. Dimana yang pertama menyerahkan hasil pleno yakni KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk persiapan pleno, lanjut Eko, pihaknya telah melakukan segala yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya tetap akan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19. "Jumlah undangan dibatasi, menjaga jarak, menyediakan cuci tangan dan juga pemeriksaan suhu tubuh seperti biasanya. Ya kurang lebih seperti pelaksanaan waktu debat lalu," beber Eko.

Ia mempersilahkan bagi Paslon yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara. Paslon dapat mengajukan gugatan ke MK. (war)

Partisipasi Pemilih di PSU Menurun

DKPP Pecat Dua Anggota Bawaslu

JAKARTA - Sejumlah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dijalankan. Hasilnya, Bawaslu mencatat ada penurunan tren partisipasi pemilih.

Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin menyatakan, jumlah pemilih yang datang di PSU tidak sebanyak saat pelaksanaan pilkada 9 Desember lalu. "Dari hasil pengawasan Bawaslu, partisipasi pemilih menurun pada PSU dibandingkan pemungutan suara serentak," ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin (16/12).

Bahkan, lanjut Afifuddin, ada yang

selisih penurunannya lebih dari 50 persen. Misalnya di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Sulawesi Utara. Saat pemungutan suara serentak 9 Desember, partisipasi mencapai 91,87 persen. "Jumlah tersebut menurun pada PSU menjadi hanya 43,9 persen," imbuhnya.

Hal serupa terjadi di salah satu TPS di Jawa Tengah. Partisipasi menurun dari 77 persen pada 9 Desember menjadi 72 persen saat PSU. Hingga kemarin rekomendasi PSU yang sudah dikeluarkan mencapai 103 TPS di 23 provinsi. Namun, Komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi belum bisa menyampaikan di mana saja PSU yang belum terlaksana. Dia mengaku masih melakukan proses rekapitulasi data secara nasional.

Terpisah, kasus pemecatan penye-

lenggara kembali diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing adalah anggota Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) Papua Elihut Towansiba dan anggota Bawaslu Minahasa Utara Rahman Ismael. Pemecatan terhadap Elihut bermula dari laporan masyarakat. Gara-gara mabuk minuman keras di kantornya, Elihut melakukan pelecehan seksual terhadap koleganya, anggota Bawaslu Marliana Mandowen.

Dalam klarifikasinya, Elihut berdalih tidak sadar saat melakukan hal tersebut. Bahkan, teradu sudah mendatangi kediaman Marliana untuk meminta maaf dengan membawa sejumlah uang tunai untuk menyelesaikan permasalahan secara adat. Namun, Marliana

menolak.

Sementara itu, Rahman Ismael dipecat sebagai anggota Bawaslu Minahasa Utara. Dia diadukan karena melakukan perselingkuhan dengan salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Minahasa Utara. Kasus perselingkuhan itu sendiri memantik keributan yang melibatkan kedua keluarga.

Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan, tindakan teradu Elihut mengonsumsi minuman keras di kantor saja sudah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Selain itu, tindakan kekerasan seksual telah mencoreng martabat penyelenggara pemilu serta melecehkan semangat penghapusan kekerasan terhadap perempuan. (far/c9/bay)

SUZUKI **ALL NEW ERTIGA** **IGNIS** **CARRY**

DP Mulai **20Jtan*** DP Mulai **20Jtan*** DP Mulai **15Jtan*** DP Mulai **12Jtan***

GEMERLAP SUZUKI

Hadiah Langsung Emas LM 2 s.d 10g*
Gratis Olie - Sparepart s.d 50.000km*

PT. KANGAROO MOTOR MANDIRI

Head Office : Jl. Mayjend Sutuyo No. 88 Kota Bengkulu. Telp : (0736) 28888/ 085 2222 11 767
Outlet Penarik : Jl. Lintas Bengkulu Padang Ds. Sidodadi Penarik. Telp. 0852-6835-8888
Outlet Camp : Jl. Durian Depan (Simpang Merigi) Kab. Kepahiang. Telp. 0821-7595-8529
Outlet Manna : Jl. Ahmad Yani Kec. Ibu Kota Manna. Telp. 0821-2314-9543

Jam Kerja Bengkulu : Senin - Jumat : 08.30wib - 18.30 WIB
Sabtu : 08.30wib - 12.30 WIB
Hotline Service : 0821-7573-6233



BEDASTER: Dondi Gatam, salah satu simpatisan Helmi-Muslihan, memakai daster keliling Simpang Lima, menepati janjinya.

Keliling Pakai Daster

BENGKULU - Peristiwa unik terjadi kemarin sore (16/12) di Simpang Ratu Samban Kota Bengkulu.

☞ Baca **KELILING**.. Hal 15

CV. CENTRAL ELEKTRO

JALAN SALAK RAYA NO. 99 LINGKAR TIMUR, KOTA BENGKULU

☎ 0736 7324 996 central_elektro.bkl
☎ 0811 7360 422 centralelektobengkulu.com

- PENGADAAN AC
- PENJUALAN AC
- SERVICE AC
- SPARE PART AC
- RENTAL AC DAN KIPAS EMBUN
- CCTV & SECURITY SYSTEM

HIKVISION **DAIKIN**

Rakyat Bengkulu

Mengucapkan **Selamat & Sukses** Akreditasi Perguruan Tinggi **UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU** Mendapatkan Predikat **BAIK SEKALI** Pertama Di Provinsi Bengkulu dan PTS Ketiga di Wilayah II Sumbagsel Meraih Predikat **BAIK SEKALI** dari BAN - PT

General Manager **Marsal Abadi, SE**

Sekolah Tatap Muka Sebaiknya Tunggu Vaksinasi

Dispendik Belum Beri Kepastian

BENGKULU - Anggota DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain mengatakan meskipun di masa adaptasi kebiasaan baru jangan sampai semua pihak lengah dengan penyebaran Covid-19. Sebab, sampai saat ini jumlah positif Covid-19 bukan semakin menurun, namun malah sebaliknya, semakin meningkat.

Politisi PAN ini pun meminta sebe-

lum adanya vaksinasi, maka sebaiknya rencana sekolah tatap muka ditunda. "Sebaiknya sekolah tatap muka tidak dilaksanakan, kecuali Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu sudah menerima vaksin dan anak-anak bisa divaksinasi, jadi tidak masalah sekolah dilakukan tatap muka karena anak-anak sudah kebal" ujarnya.



ROSMAYETTI

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bengkulu Nawardi mengatakan, bahwa sekolah maupun guru tidak akan berani melakukan sekolah tatap muka, apalagi saat ini angka positif Covid-19 sedang meningkat. Namun PGRI sebagai organisasi guru, menurut Nawardi tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Kita lihat dulu tiga subjek ini, yakni sekolah, siswa dan orangtua. Jika sekolah siap siswa siap tetapi orangtua tidak memberi izin juga tidak bisa. Maka dari itu pada saat pembagian raport sekolah menyebarkan surat pernyataan orangtua setuju atau tidak setuju bila dilakukan sekolah tatap muka. Disamping nanti ada kriteria tertentu setiap sekolah terkait protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran covid," terangnya.

☞ Baca **SEKOLAH**.. Hal 15



IKUTI: Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri saat mengikuti peringatan Hakordia tahun 2020 secara daring di Gedung Daerah Balai Semarak Bengkulu, Rabu (16/12).

Malu Menikmati Hasil Korupsi

BENGKULU - Menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi dapat menjadi salah satu cara dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini disampaikan Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri usai mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 secara daring.

"Tadi (kemarin, red) kita sudah mendengar pengarahannya bapak presiden untuk menghindari korupsi. Pada prinsipnya Pemprov Bengkulu siap untuk melaksanakan komitmen anti korupsi ini," kata Hamka di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu (16/12) usai mengikuti peringatan Hakordia yang digelar KPK.

☞ Baca **MALU**.. Hal 15

Waspada Cuaca Ekstrem Hingga Besok

BENGKULU - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fatmawati Bengkulu memprediksi peluang terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai petir dan angin kencang.

Berdasarkan pengamatan satelit cuaca, diperkirakan memasuki Jumat (18/12) besok, wilayah yang bakal mengalaminya terjadi diseluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Forecaster BMKG Fatmawati Bengkulu Dyah Rizki mengatakan, pihaknya memprediksi, penyebab terjadinya hujan deras ditambah petir dan angin kencang sesaat yang berpotensi mengancam keselamatan manusia itu, lantaran adanya pusat tekanan rendah di Samudera Hindia Barat daya Banten. "Juga karena adanya pertemuan/perlambatan kecepatan angin atau konvergensi," jelasnya kepada RB.

☞ Baca **WASPADA**.. Hal 15



AKRAB: Kabid Pembinaan SMK, Kepala SMKN 6, dewan guru, perwakilan IDUKA dan siswa berfoto bersama.

SMKN 6 Kota Bengkulu Lepas 102 Pelajar untuk Prakerin

BENGKULU - Praktek Kerja Industri (Prakerin) adalah suatu kegiatan pendidikan yang wajib diikuti untuk siswa/siswi SMK. Pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri atau dunia kerja dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa - siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan juga menambah bekal masa - masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingannya.

Di masa pandemi Covid-19 ini SMKN

6 Kota Bengkulu telah mengadakan pembekalan atau pelepasan siswa/siswi kelas XI untuk melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) kemarin, (16/12) di aula SMKN 6 dan dihadiri oleh Kabid Pengembangan SMK, Kepala SMKN Kota Bengkulu, perwakilan Industri dunia kerja (IDUKA), Siswa/siswi, Dewan Guru beserta staf dan tamu undangan lainnya. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

☞ Baca **SMKN 6**.. Hal 15

ASTRA MOTOR

KHUSUS MATIC

GRATIS

Hanya **Rp. 99.000,-** PAKET - A **11 POINT**

Hanya **Rp. 65.000,-** PAKET - B **7 POINT**

GEBYAR GANTI OLI DI AHASS

- ~ GRATIS OLI GEAR
- ~ GRATIS KONSULTASI TEKNIK
- ~ JAMINAN OLI ASLI
- ~ KEPASTIAN HARGA

Promo ini berlaku di AHASS wilayah Bengkulu

MENGALAMI KENDALA DI JALAN? ATAU MAU SERVICE DI RUMAH?

HUBUNGI LAYANAN care **0819 2500 989** ATAU 1 500 989

LEBIH MUDAH LEWAT BOOKING SERVICE DI APLIKASI: **MOTOROKU**

DOWNLOAD DI PLAYSTORE REFERRAL CODE: **HNBKBL**

Malu Menikmati Hasil ...

Sambungan dari hal 9

Lanjutnya, untuk menghindari korupsi ini berbagai langkah dan upaya akan dilakukan pemrov agar Bengkulu bebas dari korupsi. "Dan alhamdulillah juga di tahun ini kejadian kasus korupsi di Bengkulu itu hampir tidak ada," tegas Hamka.

Peringatan Hakordia dengan tema "Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti Korupsi"

secara daring ini, juga diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam sambutannya presiden mengingatkan agar pendidikan anti korupsi perlu diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.

Jokowi menilai, mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, Jokowi meminta semua lem-

baga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dengan membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Transparansi ini adalah kunci utama.

"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi," pungkask Jokowi. (key)

Sekolah Tatap Muka Sebaiknya ...

Sambungan dari hal 9

Sementara itu, meskipun ajaran baru tahun 2021 tidak lama lagi, serta ementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka bagi daerah. Namun Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bengkulu belum juga memutuskan

sekolah jarak jauh atau sekolah tatap muka.

"Kita lagi merumuskan dengan tim, ada dari unsur pengawas, tim teknis Dikdas dan GTK disanak akan tertuang langkah-langkah metode opsi susun bersama untuk menyosong New Normal di tahun pembelajaran 2021 untuk semester kedua," kata Kepala Dispendik Kota Bengkulu Dra. Rosmayetti, MM.

Kondisi pandemi Covid-19 yang sedang meningkat pada saat ini, membuat pihaknya masih melihat situasi dan kondisi. Apakah pembelajaran tatap muka bisa dilakukan atau tidak. Namun pihaknya akan meminta persetujuan orangtua jika pembelajaran tatap muka dilakukan. "Saat ini kita belum memutuskan apa-apa sebelum final dari rumusan kita bersama," ujarnya. (juu)

SMKN 6 Kota Bengkulu Lepas 102 Pelajar ...

Sambungan dari hal 9

Pelaksanaan PKL akan dimulai tanggal 21 Desember 2020 sampai 31 Maret 2021 mendatang. Total pesertanya, 102 orang siswa/siswi kelas XI. Dengan rincian 26 orang siswa jurusan Agribisnis Pengolahan hasil pertanian, 29 orang siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, 23 orang siswa jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor serta 24 orang siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.

Adapun industri dunia kerja yang melakukan kerja sama dengan SMKN 6 Kota Bengkulu sebanyak 38 IDUKA. Diantaranya Mega Komputer, Cemara Indah, Genta Lampung Makmur, dan Agnia Motor. Kepala SMKN 6 Kota Bengkulu, Syarifin Effendi, S.Pd mengatakan dengan PKL ini bisa membimbing dan mendidik siswa agar bisa bekerja ataupun membuka lapangan pekerjaan agar mengurangi jumlah pengangguran setelah tamat sekolah nanti. "Dengan adanya PKL ini

agar mampu membentuk dan mengasah kemampuan siswa/siswi menghadapi dunia kerja nanti," ungkapnya.

Waka Kesiswaan SMKN 6, Tati Efrianti, M.Pd, Si juga menambahkan PKL ini merupakan ajang siswa SMK untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di sekolah untuk diterapkan dalam dunia kerja. "PKL ini adalah tindakan nyata dalam dunia kerja, bagaimana siswa menerapkan ilmu yang mereka pelajari," tutupnya. (des/prw)

Keliling Pakai Daster

Sambungan dari hal 9

Pasalnya salah satu pendukung dari Helmi-Muslihan, Dondi Gatam mengel-

ilingi Simpang Lima dan kawasan Per-

tokean Soeprapto menggunakan daster.

Hal itu dilakukan sebagai menunaikan janji. Dimana sebelumnya, di media sosial (medsos) facebook, Dondi Gatam pernah berjanji akan berkeliling kawasan Soeprapto menggunakan daster apabila Helmi-Muslihan kalah dalam Pilgub Bengkulu 2020 ini. Terkait tindakan Dondi itu, juru bicara Helmi-Muslihan, Dedyanto, mengaku pihaknya tidak mengetahui perkara janji keliling dengan daster tersebut.

"Kita tidak mengetahui itu ya, tapi kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh teman-teman. Karena tidak semua dalam kontrol kita kan, itu mungkin cara meskipun keliru," kata Dedi, kemarin. Dijelaskannya, dengan cara demikian itu menunjukkan bahwa kesetiaan dari seorang pendukung, serta contoh untuk tunaikan janji seorang laki-laki. Sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan dukungan yang sangat kuat ke kandidat. "Karena semua orang itu memiliki kebebasan mengekspresikan mereka ke paslon. Jika kita

mengetahui dari awal, pasti kita akan memberikan bahwa tidak boleh begitu. Ternyata jauh sebelum pemilihan, mereka sudah memiliki nazar seperti itu. Dan kita menghormati dan ambil hikmahnya saja ya," tukas Dedi.

Di sisi lain, Dondi Gatam menyampaikan, tindakannya itu sebagai bentuk bayar nazar atas kekalahan pasangan Helmi-Muslihan di Pilgub Bengkulu. Bahkan ia pun mengutamakan pasangan Rohidin-Rosjonsyah. Bila paslon itu dilantik nanti, ia minta agar janji kampanye keduanya bisa ditepati.

"Tidak perlu 18 program R2, saya menantang bisa enggak Rohidin dan Rosjonsyah merealisasikan 4 program yang telah ia janjikan usai dilantik nanti," kata Dondi.

Dikatakannya, empat janji yang dimaksud yakni menggratiskan SMA/SMK, menggratiskan pajak kendaraan roda dua, menggratiskan LPJ 3 KG, dan menggratiskan PLN 4500 VA.

Untuk diketahui, perjanjian mengenai daster ini berawal dari komentar di facebook. Dimana sebagai simpatisan Helmi-Muslihan, Dondi Gatam bercanda dengan Heru Saputra yang merupakan salah satu pendukung pasangan Rohidin-Rosjonsyah. Keduanya, bersepakat jika paslon yang mereka dukung kalah, maka mereka akan mengenakan daster di Simpang 5. Meskipun pleno rekapitulasi perhitungan suara belum dilakukan, ia diminta untuk menunaikan janji tersebut.

"Saya lumayan kecewa karena Heru tidak hadir di sini," tutupnya. (war)

Waspada Cuaca Ekstrem ...

Sambungan dari hal 9

Konvergensi adalah daerah pertemuan angin dimana kecepatan anginnya semakin kecil yang dapat membentuk awan-awan pemicu hujan. Pengaruh pusat tekanan rendah dan konvergensi ini, ikut memicu, terjadi peningkatan tinggi gelombang di laut. Berdasarkan pengamatan diprediksi tinggi gelombang bisa mencapai hingga 2,5

meter di Perairan Bengkulu Enggano hingga Samudera Hindia Barat Bengkulu. Sementara itu sambung Dyah memasuki Kamis (17/12) hari ini peristiwa yang sama berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang bisa diperkirakan juga terjadi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 2,5 meter diperaian Bengkulu

Enggano hingga ke Samudera Hindia Barat Bengkulu. «Untuk perkiraan terjadi pada Kamis, ini potensi waktu terjadinya mulai siang hingga malam hari,» beryanya. Terkait kondisi ini masyarakat diminta tetap waspada atas kemungkinan terjadinya potensi banjir, tanah longsor dan angin kencang sesaat akibat hujan deras atau hujan dengan durasi yang lama. (iks)

Program Relaksasi, Peserta Menunggak Tetap Bayar

BENGKULU - Baru-baru ini berseliweran pesan berantai melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan BPJS Kesehatan ada program relaksasi, yang isinya pasien BPJS yang menunggak iuran sampai 3 tahun, cukup bayar 6 bulan saja. sehingga sisa tunggakan tidak perlu dibayar lagi.

Humas BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Dedy Wahyudi, ketika dikonfirmasi RB, mengaku sudah mendapat pesan berantai tersebut. Namun ia menegaskan, bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Dijelaskannya, Program Relaksasi Tunggakan BPJS Kesehatan diprioritaskan bagi peserta BPJS Kesehatan menunggak lebih dari 6 bulan.

Bagi yang mengikuti program ini kartunya dapat langsung diaktifkan dan digunakan, dengan syarat membayar terlebih dulu tunggakan iuran 6 bulan. Namun sisa tunggakan lainnya, masih harus dibayar oleh peserta dengan cara mencicil selama 1 tahun. "Program Relaksasi ini memang ada, tapi bukan berarti sisa tunggakan yang lama itu dihapuskan setelah membayar tunggakan selama 6 bulan. Seperti yang beredar di WA (WhatsApp)," kata Dedy.

Lanjutnya, program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang memberikan keringanan bagi peserta BPJS Kesehatan untuk dapat mencicil sisa tunggaknya tersebut selama 1 tahun atau sampai akhir tahun 2021. Sedangkan untuk pendaftaran Program Relaksasi Tunggakan ini sudah dimulai sejak Juni dan akan berakhir cukup panjang hingga 27 Januari 2021 yang akan datang.

"Misal ada peserta menunggak selama 2 tahun. Namun dia ingin segera memanfaatkan layanan kesehatan (misal : operasi) dengan program ini bisa dibayar 6 bulan dulu dan kartu langsung aktif bisa digunakan. Sisa tunggal (18 bilang lagi) bisa dicicil pembayarannya sampai tahun 2021," papar Dedy.

Boom Sale di Ace Hardware Benmall

Dapatkan Hemat 50% + 50%

BENGKULU - Ace Hardware memberi promosi spesial dan menarik bagi pelanggan setia. Dapatkan program Boom Sale berupa hemat 50 persen ditambah 50 persen (50%+50%). Promo ini batas waktunya cukup panjang hingga 27 Januari 2021 yang akan datang.

Pengunjung tetap diminta mematuhi protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Manager Ace Hardware Bencoolen Mall (BenMall), Syarifullah mengatakan Ace hardware merupakan pusat retail kebutuhan living dan gaya hidup terlengkap di Indonesia. Saat ini mengadakan promo Boom Sale hemat sampai 50%+50% untuk beberapa produk di katalog-



LAYANAN: Di masa pandemi Covid-19 ini, BPJS Kesehatan menerapkan protokol kesehatan ketat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Cara ikut Program Relaksasi, sambung Dedy, dengan mengajukan permohonan melalui mobile JKN (Self Service) pada menu Relaksasi, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 (aplikasi care center pada menu relaksasi) atau datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan (Aplikasi SIPP Cabang) dengan membawa fotokopi dan KTP. Apabila diwakilkan dengan membawa surat kuasa bermaterai dan foto copy peserta yang memberi kuasa.

Setelah proses permohonan disetujui maka pembayaran dapat dilakukan mulai keesokan harinya di kanal-kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Seperti bank, PPOB (Alfamart, Pos, Indomaret, Pegadaian, dan berbagai agen pulsa/warung/toko dan uang elektronik. "Peserta yang telah terdaftar diberikan kesempatan mengangsur sisa tunggakan sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan peserta. Peserta yang telah mendaftar untuk mendapatkan fasilitas Program Relaksasi Tunggakan namun menunggak kembali masih diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali," jelas Dedy. (key)

pada RB.

Tak itu saja, ada juga healthy deals - hemat hingga 30% + 10% untuk produk sepeda airwalk, organized deal - hemat hingga 50% dan buy one get one, cicilan 0% hingga 12 bulan untuk bank BCA, CIMB Niaga, BRI, BNI dan Mandiri).

Sementara itu kata Syarifullah bagi yang belum menjadi member Ace Rewards dapat segera gunakan kesempatan menjadi member Ace Rewards secara gratis dengan mendaftar melalui website https://www.acehardware.co.id/membership.

Masa berlaku periode keanggotaan Ace Acces selama 6 bulan. Member dapat menikmati benefit seperti info produk dan penawaran terbaru, gratis biaya pengantaran dan harga khusus member namun tidak mendapatkan point rewards dari transaksi serta tidak mendapatkan welcome gift berupa mini toolbox. Jika transaksi sudah mencapai Rp 2 juta dalam kurun waktu 6 bulan maka otomatis keanggotaan akan menjadi Ace Rewards dan dapat mengakses seluruh benefit keanggotaan Ace Rewards. Namun jika dalam kurun waktu 6 bulan nilai transaksi tidak mencapai Rp 2 juta maka membership akan dihentikan secara otomatis. "Bagi anda yang menyukai belanja secara online, anda bisa juga melakukan pembelian melalui online," tukasnya.

Caranya adalah dengan cara mendownload aplikasi di play store atau appstore "rupa rupa" atau bagi anda yang member bisa mendownload aplikasi "miss ace" dan dapatkan penawaran menarik flash sale setiap hari selasa dan Kamis berupa potongan diskon hingga 50%. (iks)

LAYANAN SMS PDAM KOTA BENGKULU

Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.

Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.

UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)

Mohon SMS kan ke **0821 8613 4569** sbb:

a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan /keluhan

Mohon Informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

Education Quality is Our Concern

Civitas Akademika Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Virtual "Yudisium", 14 Desember 2020 & Virtual Graduation Ceremony, 16 Desember 2020

Kepada:

No	Nama Mahasiswa
1	JUNIDIA PUSPITA SARI, M.M.
2	APRIDA SHANTI, M.M.
3	ERINDA WIDIYANINGSIH, M.M.
4	DHESI ELFRYANTI GINTING, M.M.
5	MASPIN BAHRI, M.M.
6	RIA ARESTYA ANDINI, M.M.
7	RAHMI HIDAYATI, M.M.
8	PUSDA SARI, M.M.
9	VITO VANDEWINATA, M.M.
10	HERLIANSYAH, M.M.
11	SELAMET FUADI, M.M.
12	MILA APRILIA, M.M.
13	VOVI ASTRIANI, M.M.
14	WIDYA NOVIYANTI, M.M.
15	HERY SURYANTO, M.M.
16	SYAHRUL MUBARAK, M.M.
17	MUHAMAD ANGGA, M.M.

Dr. Slamet Widodo
Koordinator

Meiliani, Ph.D
Sekretaris

TERAKREDITASI "A" (EXCELLENT)

http://mm/feb.unib.ac.id

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGKALAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

Surya Orlana, SE, M.Si
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Harga

KOMODITI	SATUAN HARGA (Rp)	KETERANGAN
1. BERAS	- R64 (Lokal Lampung) kg 10.000	
	- R64 (Lokal Bengkulu) kg 10.000	
	- Manggala Manis (Premium) kg 12.500	
	- Kembang Kol (Premium) kg 11.500	
	- Termerah kg 9.375	
	- Cap Bulog/ Dolog kg 7.125	
	- ON kg 12.500	
2. GULA PASIR	- Bimoli Karmasan 1 liter 15.000	
3. MINYAK Goreng	- Tanpa Merk 12.150	
4. DAGING	- Sapi Lokal Paha Belakang kg 120.000	
	- Sapi Lokal Paha Depan kg 120.000	
	- Sandung Lemur kg 80.000	
	- Tetelan kg 60.000	
	- Has Luser kg 120.000	
	- Has Dalam kg 120.000	
	- Daging Ayam Broiler kg 34.000	Turun
	- Daging Ayam Kampung kg 65.000	
5. TELUR	- Telur Ayam Broiler kg 25.000	Naik
	- Telur Ayam Kampung kg 52.000	
6. Cabe Merah Keriting	kg 42.000	
7. Cabe Rawit Hijau	kg 25.000	
8. Bawang	- Merah kg 35.000	
	- Putih kg 26.000	
9. Susu Kental Manis	- Benda kg 370 gr 11.000	
	- Indomilk kg 370 gr 10.000	
10. Garam	- Beryodium Halus kg 13.000	
11. Kacang	- Kadelar Eks Impor kg 8.600	
	- Lokal kg 25.000	
12. Mie Instan	- Hijau bks 3.000	
13. Ikan	- Kani Ayam kg 60.000	
	- Kembung kg 35.000	
	- Segar Tongkol/ Tuna kg 25.000	
14. Karetela Pohon	kg 4.000	
15. Jagung Pipilan Kering	kg 7.000	

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

KOMODITI	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1. Semen 3 Roda	57.000	
2. Semen Holcim	57.000	
3. Semen Merah Putih	55.000	
4. Nama Padang	58.000	
5. Besi Beton 6 mm	30.000	
6. Besi Beton 8 mm	35.000	
7. Besi Beton 10 mm	47.000	
8. Besi Beton 12 mm	57.000	
9. Triplek 6 mm	95.000	
10. Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
11. Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12. Paku 2 cm (1 1/2 inch)	20.000	
13. Paku 3 cm (1 1/2 inch)	17.000	
14. Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15. Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16. Paku 7 cm (3 inch)	17.000	
17. Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18. Pupuk KCL	7.000	
19. Pupuk NPK (Mutiar)	10.000	
20. Pupuk SP3	2.000	
21. Pupuk Urea	7.000	
22. Pupuk ZA	1.400	
23. Gas LPG 3 Kg	18.000	
24. Besi Ring	81.000	

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

TELEPON PENTING	
Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154

Warga Laporkan Kasus Coblos Lebih 1 Kali

PELABAI - Dugaan kasus pemilih mencoblos lebih satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak bisa diterima begitu saja. Kemarin (16/12), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong menerima laporan dugaan kasus pencoblosan lebih satu kali oleh satu pemilih di TPS 2 Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas.

Laporan Deni Aryantoni, warga Desa Tabeak Belau I, Kecamatan Lebong Atas itu masih ditelaah pihak Bawaslu. "Laporannya baru diterima. Berhubung saya bersama dua komisioner Bawaslu lainnya sedang mengikuti rakor (rapat koordinasi, red) di Bengkulu, laporan diterima oleh staf di sekretariat," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jeffriyanto, SP, M.Pd kepada RB saat dihubungi via telepon, kemarin.

Dipastikannya laporan yang kejadiannya belum terpantau oleh Bawaslu melalui perangkannya di Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Lebong Atas ini, akan ditindaklanjuti. Tentunya jika dari hasil telaah tim Bawaslu didapati bukti yang kuat sebagaimana dugaan yang dilaporkan. Jika terbukti, pelaku bisa dipidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 18 juta.

"Dalam pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu, masalah mencoblos lebih satu kali di TPS yang sama itu sudah dijelaskan secara rinci. Termasuk jika penyelenggaranya terlibat, tentu saja akan kami proses," ujar Jeffriyanto.

Sementara Deni Aryantoni mengaku kalau Re, warga yang dilaporkannya itu, menggunakan undangan anaknya yang juga memilih di TPS yang sama dengannya. Yakni TPS 2 Desa Daneu. Terlepas penggunaan undangan oleh Re yang seharusnya bukan untuknya itu diketahui Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) atau tidak, ia minta Bawaslu menegakkan keadilan. Menindaklanjuti laporannya itu.

"Dalam laporan tadi (kemarin, red) ada empat alat bukti yang saya sampaikan. Antara lain pengakuan dari saksi yang menyampaikan informasi dan rekaman audio anak terlapor bahwa hak pilihnya sudah digunakan orang lain. Termasuk SK (surat keputusan, red) penetapan DPT (daftar pemilih tetap, red) serta SK KPU tentang penetapan petugas KPPS dan penetapan petugas Linmas," ungkap Deri. (sca)

Nomenklatur Lima OPD Menggantung

PELABAI - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong merubah nomenklatur 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di-hembuskan sejak awal tahun, hingga saat ini belum terwujud. Teknisnya masih dikaji Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabupaten Lebong.

"Awalnya kami merencanakan draf Raperda (Rancangan Peraturan Daerah, red) perubahan nomenklatur lima OPD itu sudah dibahas di DPRD tahun ini, namun tidak terkejar," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Diupayakan, tahun depan usulan perubahan nomenklatur 5 OPD itu sudah masuk di legislatif. Soalnya perubahan nomenklatur kelima OPD itu diklaimnya penting dalam memaksimalkan dan menyesuaikan tugas dan fungsi OPD. Salah satunya memudahkan proses koordinasi ke pusat melalui kementerian yang membidangi. "Itu sesuai hasil kajian dan analisa Bagian Organisasi dan Tata Laksana," terang Mustarani.

Intinya akan ada OPD yang statusnya meningkat dan ada juga yang struktur organisasinya dirampingkan. Untuk struktur OPD yang ditingkatkan, akan ada penambahan bidang dan sub bidang. Sedangkan OPD yang akan dirampingkan adalah OPD yang bidang kerja dan sub bidangnya yang terlalu banyak. "Dari analisa kinerja yang kami lakukan di lima OPD itu, memang kondisi struktur organisasinya layak direvisi," ungkap Mustarani.

Kelima OPD yang diusul berubah nomenklaturnya itu, antara lain Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dirancang berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial akan dipecah menjadi dua OPD terpisah. Termasuk Sekretariat Kabupaten terdapat perubahan pada bagian dan sub bagian.

Lainnya, Inspektorat Daerah akan ada penambahan inspektur pembantu (Irbn). Terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan dilakukan perampingan dengan pengurangan jumlah bidang. (sca)



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

AYO MULAI DARI DIRI SENDIRI JAGA LEBONG DARI PENYEBARAN COVID-19

Kami Mengimbu Masyarak
Tidak Menggelar Pesta
yang Mengundang Kerumunan
Demi Mencegah Timbulnya Klaster Baru
Penyebaran Covid-19
serta Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan





Sekda Lebong
H. Mustarani Abidin, SH, M.Si



ALTERNATIF: Para tenaga kerja kontrak (TKK) yang sementara ini masih diberdayakan Pemkab Lebong membantu tugas PNS karena keterbatasan jumlah pegawai.

Usai Pilkada, Pejabat Mulai Ketar-ketir

PELABAI - Pergantian kepala daerah di Kabupaten Lebong awal tahun depan, jelas akan berdampak ke para pejabat di birokrasi. Berhembus kembang kalau kepala daerah Kabupaten Lebong Kopli Ansori dan Fahrurrozi yang terpilih sebagaimana hasil pleno KPU sudah mulai berancan-ancan menyusun kabinet. Tidak menutup kemungkinan bakal banyak pejabat yang digusur dari kursinya saat ini.

Baik jabatan eselon II maupun eselon III yang dalam struktur birokrasi menduduki posisi strategis. Hasil pantauan di internal Pemkab Lebong, tidak sedikit pejabat yang mulai ketar-ketir dengan wacana formulasi baru dalam struktur pemerintahan Lebong mendatang. Bahkan tidak sedikit PNS yang sudah mulai mengurus pindah tugas ke daerah lain.

Baik sebelum maupun setelah perhelatan pilkada.

"Tahun ini kami menerima puluhan berkas PNS yang mengajukan pindah tugas dan sebagian diantaranya sudah ada yang direkomendasi," kata Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Apedo Irman Bangsawan, SH.

Rata-rata PNS yang mengusulkan pindah tugas itu berposisi di eselon III. Namun Apedo tidak bersedia membeberkan secara rinci alasan kepindahan para PNS itu. Hanya menyebutnya secara umum usulan kepindahan tugas PNS di Lebong karena alasan keluarga. Mulai dari turut suami maupun alasan faktor kesehatan yang mengharuskan PNS bersangkutan pindah ke

daerah yang memiliki rumah sakit yang fasilitas medisnya memadai.

Sementara tokoh masyarakat Lebong, Alfian mengatakan, sudah menjadi hal yang lumrah penggantian kepala daerah akan diiringi pergantian wajah kabinet. Karena seorang pemimpin butuh orang-orang yang dapat dipercayainya, mampu menunjang kepemimpinannya. Namun akan menjadi tidak wajar jika orang yang ditugaskan menduduki suatu jabatan tidak memahami bidang kerja yang diamanahkannya.

"Kalau banyak PNS yang sekarang ketar-ketir, itu juga wajar. Apalagi tidak sedikit ASN (Aparatur Sipil Negara, red) di lingkungan Pemkab Lebong yang patut diduga terlibat dalam politik praktis di Pilkada ini," ujar Alfian. (sca)



RAWAN : Dinas PUPRHub Lebong yang hingga saat ini masih kekosongan pejabat definitif, dikhawatirkan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan ke depan.

Lelang Eselon II Tunggu Anggaran

PELABAI - Agenda lelang di-

lapan jabatan eselon II atau setara kepala dinas (kadis) yang sampai saat ini kosong, ditunda tahun depan. Namun teknisnya menunggu kepastian anggaran yang akan diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong telah mengusulkan dana Rp 400an juta untuk bisa menggelar lelang jabatan PNS eselon II itu.

"Kalau anggarannya disetujui oleh dewan, tentunya agenda lelang delapan jabatan eselon II itu bisa kami laksanakan tahun depan (2021, red). Begitu juga sebaliknya, kalau anggarannya tidak

ada bagaimana bisa jabatan itu dilelang," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Anggaran itu dibutuhkan untuk membentuk panitia seleksi (pansel) lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Soalnya melalui pansel yang terdiri dari kalangan akademisi, birokrat dan tokoh masyarakat itulah teknis lelang dilaksanakan. Tahapan lelangnya juga cukup panjang, mulai dari tes tertulis, psikotes hingga penyusunan makalah ilmiah.

"Sebenarnya lelang jabatan itu sudah diagendakan sejak tahun 2019. Bahkan tahun ini sempat dianggarkan dana Rp 400 juta untuk kegiatan itu. Hanya saja dananya dipangkas hingga 50 persen dampak pandemi Covid-19 sehingga dengan dana yang tersisa itu tidak memungkinkan

dilaksanakan lelang jabatan," terang Sekda.

Diketahui, delapan jabatan eselon II yang akan dilelang itu antara lain, jabatan Sekretaris DPRD, jabatan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta jabatan kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP). Termasuk jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta jabatan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM).

Lainnya, jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-Hub), jabatan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) serta jabatan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan jabatan Sekretaris DPRD Lebong. (sca)



RANGKA ATAP

BAJA RINGAN / KUDA - KUDA METAL
PENGANTI KAYU

- SH. TRUSS bebas perawatan
- SH. TRUSS Kuat, Ringan, dan Anti Gempa
- SH. TRUSS terbuat dari ZINCALUME / ALUZINC
- SH. TRUSS di jual batangan

Hubungi SINAR HARAPAN
Jl. Kinibalu No.87 Kebun Tebeng Bengkulu
Tlp. (0736) 21653, Hp. 0822 7838 6870



PT. NURTANI JAYA

Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprapto No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

Angka Golput Puluhan Ribu



PLENO: Pelaksanaan pleno oleh KPU Mukomuko berakhir sekitar pukul 22.00 WIB, kemarin (15/12).

MUKOMUKO – Jumlah warga Kabupaten Mukomuko yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak tahun 2020, tidak menggunakan hak pilihnya alias golput mencapai 26.434 orang. Belum diketahui secara pasti apakah warga itu datang ke Tempat

Pemungutan Suara (TPS), tetapi tidak menyalurkan hak pilihnya. Dalam artian hanya datang melihat-lihat saja. Atau puluhan ribu warga itu memang benar-benar tidak datang ke TPS.

Jumlah DPT di Kabupaten Mukomuko, mencapai 124.418 orang. Terdiri 63.580

pemilih laki-laki dan 60.838 pemilih perempuan. Dari jumlah itu, warga di dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 97.989 orang. Yakni 48.586 pemilih laki-laki dan 49.398 pemilih perempuan. Baik itu untuk di Pilbup Mukomuko maupun untuk Pilgub Bengkulu.

PENGGUNA HAK SUARA MUKOMUKO			
Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah DPT	63.580	60.838	124.418
Pemilih Dalam DPT	48.586	49.398	97.984
Tidak Memilih	14.994	11.440	26.434
Jumlah Disabilitas	244	258	502
Pemilih Disabilitas	168	172	340
Tidak Memilih	76	86	162

Menunjukkan bahwa pemilih perempuan, lebih tinggi angka partisipasinya menyalurkan hak suaranya. Meskipun secara jumlah DPT, jumlah pemilih perempuan kalah dengan jumlah pemilih laki-laki. Jumlah pemilih laki-laki tidak gunakan hak pilihnya, capai 14.994 orang. Sedangkan pemilih perempuan, yang tidak memilih hanya 11.440 orang.

Sedangkan untuk pemilih kategori pemilih disabilitas se-Kabupaten Mukomuko 502 orang. Terdiri 244 laki-laki dan 258 perempuan. Yang tidak memilih sebanyak 162 orang. Terdiri 76 orang laki-laki dan 86 orang perempuan. Mereka yang menggunakan hak suaranya ada 340 orang, yaitu 168 laki-laki dan 172 perempuan.

Komisiner KPU Mukomuko Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Mansur S menyakini, faktor kondisi cuaca pada hari pemilihan cukup mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilihnya. Dimana saat itu hujan sudah turun sejak malam hari. Berlanjut sampai siang hari. Ada kemungkinan sejumlah pemilih memilih tetap berdiam diri di rumah. “Faktor cuaca menurut kami, mempengaruhi sangat besar. Sebab untuk sosialisasi, kalau menurut kami sudah maksimal,” klaim Mansur.

Kondisi ini dapat pula dipantau dengan adanya TPS yang jumlah warga datang menyalurkan hak pilihnya tidak sampai 100 orang. Ini dikarenakan kondisi in-

frastuktur di wilayah tersebut. Ditambah cuaca hujan, membuat warga bertambah enggan keluar rumah mendatangi TPS di jam-jam pemilihan.

Seperti di TPS 2 Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman. Dimana jumlah warga menggunakan hak pilih hanya 47 orang. Masih di Kecamatan yang sama, di TPS 2 Desa Lubuk Talang, pengguna hak pilih 78 orang. TPS 4 Desa Gajah Makmur, pengguna hak pilih hanya 37 orang. Dan di TPS 3 di desa itu, hanya 86 orang yang menggunakan hak pilihnya.

“Ini bisa dilihat di beberapa TPS yang aksesnya masih memprihatinkan. Memang rendah partisipasi masyarakat menyalurkan hak suaranya. Selain itu bisa jadi saat itu pemilih sedang tidak berada di tempat,” kata Mansur.

Meski angka golput terbilang tinggi, tetapi secara global, KPU Mukomuko dapat disebut sukses memenuhi target partisipasi pemilih. Dari target 80 persen, tercapai sekitar 79,98 persen. Hanya meleset 0,02 persen. Angka ini juga meningkat signifikan dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2015 lalu.

Pada Pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi Covid-19. Artinya, pemungutan suara dilakukan saat terjadi bencana non alam, namun angka partisipasi bisa lebih meningkat. “Itu bukti sosialisasi kita sukses. Ditengah bencana non alam, partisipasi pemilih lebih meningkat dibandingkan Pilkada tahun 2015,” pungkasnya. (hue)

Lintas

5.934 Warga Gigit Jari

MUKOMUKO – Masih 5.934 warga di Kabupaten Mukomuko, yang belum kunjung mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Sejak sudah diajukan, mereka belum juga mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap orang tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mukomuko, H. Herlian, S.Sos, M.Si mengungkapkan, data yang diterima pihaknya, baru 2.615 orang di Mukomuko, menerima BPUM. Dengan total dana yang dikucurkan ke Mukomuko, sekitar Rp 6,2 miliar lebih.

“Padahal total warga yang sudah diajukan oleh Dinasnya, sebanyak 8.549 orang. Data yang diperoleh Dinas, yang sudah diberikan bantuan BPUM baru sebanyak 2.615 orang,” ungkap Herlian.

Jumlah warga itu belum termasuk yang diajukan langsung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian dan Koperasi. Mengingat instansi dan lembaga itu diperbolehkan mengajukan sendiri warga-warga yang layak menerima BPUM.

“Data 8.000 lebih yang kami usulkan lewat dinas. Ada juga yang diusulkan oleh BRI, Pegadaian, Koperasi. Mereka bisa mengajukan, karena linknya dibuka oleh pusat,” terang Herlian.

Untuk jumlah warga yang sudah menerima, seluruhnya melalui BRI. Mengenai apakah bantuan itu sudah cairkan seluruhnya oleh penerima, Herlian mengaku belum mengetahui. Yang lebih mengetahui datanya tentu bank yang melakukan pembayaran yakni BRI. “Yang pasti sudah menerima itu, yang lewat BRI. Apakah warga sudah ambil apa belum, itu BRI yang tahu,” kata Herlian.

Terkait kelanjutan tahun depan, menurut informasi yang diterimanya berkemungkinan besar akan tetap berlanjut. Untuk pastinya masih menunggu. “Mudah-mudahan benar-benar lanjut. Warga yang sudah kita usulkan itu bisa bertambah sebagai penerima BPUM,” harapnya.

Dijelaskannya, BPUM merupakan modal kerja kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan. Baik kredit usaha rakyat (KUR), maupun pinjaman modal kerja dan investasi lain dari perbankan. Tujuannya agar usaha mikro bangkit kembali di masa pandemi Covid-19.

“Program ini juga termasuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Bantuan produktif UMKM menyasar usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan perbankan. Makanya yang dapat ini khusus para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan,” pungkasnya. (hue)

JUAL & ISI ULANG
TABUNG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) | GUARANTEED

CEGAH KEBAKARAN DI RUMAH ANDA???

GUNAKAN APAR

- Aman
- Praktis
- Ekonomis

Kami Siap Antan Ke Rumah Anda

-0813 6778 7901
-0812 6169 4484
-0823 76 777776
-0736 52881

Loyalis Huda Tetap Dipakai

Minimal Enam Bulan Kepemimpinan Sapuan

MUKOMUKO – Dipastikan usai dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko periode berikutnya. H. Sapuan – Wasri belum akan bisa mewujudkan misinya. Yakni merombak kabinet “warisan” Chorul Huda-Haidir. Pasalnya, sesuai ketentuan bupati tidak boleh melakukan mutasi dan rotasi jabatan sebelum enam bulan pertama menjabat.

Artinya, masyarakat jangan terlalu berharap banyak selama 100 hari kerja pada H. Sapuan – Wasri merombak pemegang jabatan di Pemkab Mukomuko saat ini yang merupakan loyalis Huda. Mereka mau tidak mau harus

memberdayakan terlebih dahulu pejabat yang ada. Minimal selama enam bulan pertama kepemimpinan Sapuan-Wasri nanti.

Kondisi ini juga menjadi peluang bagi sejumlah pejabat yang selama ini diyakini tak mendukung Sapuan-Wasri, melakukan pendekatan atau lobi-lobi pasang muka manis ke bupati baru nantinya, agar tak sampai masuk gerbong eks pejabat. Kecuali yang memang memasuki waktu pensiun tahun 2021.

Tidak hanya itu, Sapuan – Wasri juga tetap harus menjalankan program kerja yang sudah dirancang Huda-Haidir bersama DPRD Mukomuko untuk APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021. Pasalnya, pelantikan mereka di

Februari 2021 mendatang, APBD 2021 itu sudah disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) yang wajib dilaksanakan.

Meskipun nantinya, Sapuan – Wasri punya peluang dengan melakukan pergeseran. Namun pergeseran anggaran tidak bisa dilakukan dengan menghapus program kerja yang anggarannya sudah diploting.

Mengenai ini, Ketua Tim Pemenangan Sapuan-Wasri, Nasir Ahmad tak mengelak. Sudah aturannya demikian, Sapuan tetap memberdayakan pejabat yang ada saat ini. “Tetap gunakan orang-orang (pejabat) yang ada. Sampai waktu tertentu nanti,” kata Nasir Ahmad yang biasa disapa Aat Nasir ini.

Dia juga menyampaikan, sam-

pai kemarin, Sapuan-Wasri belum melakukan tindakan apapun atau pembahasan secara mendalam soal komposisi jabatan di tatanan pemerintahan Kabupaten Mukomuko. Menurutnya, hal itu terlalu dini. Dan menurut saya, Pak Sapuan dan Bu Wasri juga butuh waktu melihat, kemudian merancang, siapa dan di posisi mana. Komitmen beliau akan menempatkan orang tepat di jabatan yang tepat. Kalau soal rotasi pejabat, saya kira pasti ada nanti,” pungkasnya. (hue)



BERKUNJUNG: Bupati Mukomuko H. Choirul Huda, SH saat menerima kunjungan KPPN Mukomuko.

Realisasi Belanja Barang Pilkada Belum Disahkan

MUKOMUKO – Realisasi anggaran dalam pelaksanaan Pilkada Mukomuko masih menjadi perhatian serius. Pasalnya, realisasi anggaran belanja ini akan sangat mempengaruhi besaran realisasi belanja yang tercatat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko. Kepala KPPN Mukomuko Rusli Zulfian mengatakan, pihaknya yakin serapan belanja barang untuk kegiatan Pilkada, sudah cukup besar. Hanya saja kendalanya belum dilakukan pengesahan. Setelah semuanya tuntas disahkan, maka capaian realisasi akan terlihat signifikan.

“Rendahnya realisasi anggaran belanja barang sehubungan dengan belum

dilakukannya pengesahan realisasi belanja hibah terkait Pilkada,” jelas Rusli.

Sangat tampak dampaknya terhadap pagu belanja anggaran sejumlah Rp 70 miliar. Karena sebagian besar pagu di belanja barang untuk kegiatan pelaksanaan Pilkada. Yang kegiatan puncaknya baru saja digelar pada 9 Desember.

Belanja yang terbesar realisasinya masih di item belanja pegawai. Dari pagu Rp 69,4 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp 63,05 miliar. Masih menyisakan sekitar Rp 6,4 miliar lagi. “Pembayaran belanja pegawai mencapai Rp 63,05 miliar. Naik dari bulan lalu sebesar Rp 57,6 miliar,” sebut Rusli.

Sedangkan untuk belanja

modal, realisasinya baru Rp 7,3 miliar dari total pagu Rp 11,2 miliar. Masih menyisakan anggaran sekitar Rp 3,8 miliar. Sementara itu, untuk dana transfer dari pusat ke daerah. Baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, maupun Dana Desa (DD), capaiannya sudah 97,8 persen. Pagu total Rp 214,6 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp 209,8 miliar. Sehingga sisa pagu hanya Rp 4,8 miliar.

“Untuk item ini, bisa dikatakan realisasinya sudah 100 persen. Masih ada sisa pagu, karena untuk DAK Fisik, dana yang disalurkan sesuai dengan kontrak. Beda dengan dana yang disalurkan sesuai dengan pagu yang diberikan pemerintah pusat,” jelasnya. (hue)

Delapan Poli RSUD Kembali Buka

Swab 14 Nakes Positif Covid-19

MUKOMUKO – Sempat keluar kebijakan menutup pelayanan Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko hingga batas waktu belum ditentukan. Terbaru, Direktur RSUD Mukomuko dr. H. Tugur Anjastiko menyatakan delapan Poli telah bisa dibuka kembali.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 445/671/F1/SE/XII/2020. SE ini hasil rapat membahas mengenai tenaga kesehatan (nakes) RSUD Mukomuko yang terkonfirmasi Covid-19 dan mengenai kelanjutan pelayanan poli. “Kebijakan baru sesuai dengan hasil rapat bidang pelayanan medis (Yanmed) dan bidang keperawatan,” kata Anjas.

Dari delapan Poli itu, sebanyak lima Poli sudah mulai dibuka. Yakni Poli Bedah, Poli Anak, Poli Kebidanan, Poli Paru dan Poli Gigi. Sedangkan Poli Penyakit Dalam menyusul setelah dibukanya lima Poli tersebut.

Kemudian untuk Poli Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), direncanakan akan mulai dibuka pada Selasa, 22 Desember 2020 mendatang. Poli Umum sudah dibuka setiap hari. Terkecuali hari libur.

Sedangkan satu Poli lagi, Konservasi Gigi, masih diputuskan ditutup untuk sementara waktu. “Jadi ada yang sudah mulai buka. Ada juga yang baru akan buka akhir Desember. Terus ada satu Poli, itu masih berstatus tutup sementara,” jelas Anjas.

Kebijakan baru ini setelah hanya 14 orang nakes di RSUD Mukomuko yang hasil swab positif Covid-19. Mereka kini sudah diharuskan menjalani isolasi mandiri. Sedangkan karyawan lainnya, diperintahkan untuk kembali masuk kerja sesuai dengan jam dan hari yang sudah diatur.

“Semuanya kita berupaya kembali normal. Artinya, seluruh pelayanan yang selama ini tersedia, kita usahakan kembali berjalan seperti biasanya,” kata Anjas.

Pihaknya berharap masyarakat dapat sama-sama mematuhi protokol kesehatan (Prokes) ditengah pandemi Covid-19. Terlebih lagi ketika datang atau berada di RSUD Mukomuko. Ini untuk menjaga, lingkungan RSUD Mukomuko terbebas dari terjadinya penularan Covid-19.

“Mohon bersama-sama, kita wujudkan RSUD bebas dari Covid-19. Karena ini terkait dengan kepentingan masyarakat umum. Ketika RSUD heboh dengan penularan Covid-19, maka dampaknya akan sangat luas. Akan banyak masyarakat yang dirugikan, karena akan kesulitan mendapatkan pelayanan medis,” demikian Anjas. (hue)

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS KETAHANAN PANGAN Jalan Terminal Simpang Nangka Air Heles Atas CURUP - 39153			
Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup			
1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sewi Manis	3.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kof	5.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000
9. Wortel	5.000	18. Kof Kembang	10.000
		19. Daging Sapi	120.000
		20. Daging Kerbau	120.000
		21. Ikan Nila	26.000
		22. Ikan Mas	30.000
		23. Ikan Laut Sarden	26.000
		24. Ikan Lele	24.000
		25. Telur Ayam Ras	22.000
		26. Daging Ayam Ras	32.000
		27. Beras Premium	10.250

LINTAS

Positif Covid-19 Kembali Bertambah

CURUP – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) kembali mencatat adanya tambahan kasus positif Covid-19 Baru di Kabupaten RL. Kemarin (16/12) tercatat ada dua kasus tambahan konfirmasi positif Covid-19. Seperti yang disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kepada RB kemarin.

Dirincikan Syamsir, dua kasus baru tersebut yaitu kasus 378 seorang perempuan (60) asal Kecamatan Curup. Serta kasus 379 seorang laki-laki (22) tahun asal Kecamatan Curup Tengah. "Kedua kasus baru positif Covid-19 ini sudah melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing," sampai Syamsir.

Dilanjutkan Syamsir, dengan adanya dua tambahan kasus baru tersebut total keseluruhan jumlah konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten RL mencapai 379 kasus. Sedangkan untuk jumlah selesai kasus konfirmasi atau sembuh sebanyak 352 kasus. "Sedangkan untuk kasus konfirmasi positif yang masih dalam pengawasan tersisa sebanyak 27 kasus," sambung Syamsir.

Ditambahkan Syamsir, mereka juga mencatat jumlah pelaku poerjalanan sudah mencapai 13.601 orang. Dengan jumlah suspek sebanyak 254 orang, suspek discarded sebanyak 163 orang. Serta suspek di isolasi sebanyak 2 orang dan probable sebanyak 6 orang. "Untuk sampel yang diperiksa di Laboratorium sampai hari ini (kemarin, red) sebanyak 1.887 dengan jumlah sampel positif sebanyak 379 sampel dan yang negatif sebanyak 1.510 sampel," demikian Syamsir. (dtk)



LEPAS LIAR : Petugas dari SKW I BKSDA Bengkulu melakukan lepasliar satwa dilindungi di kawasan TWA Bukit Kaba.

Tiga Ekor Satwa Dilindungi Dilepasliarkan Di TWA Bukit Kaba

CURUP – Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, kemarin melepasliarkan tiga ekor satwa dilindungi. Serta melepasliarkan dua ekor satwa jenis ulang yang tidak dilindungi. Pelepasliaran satwa liar kemarin dilakukan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba bersama Komunitas Pelindung Satwa (KPS) Curup.

Dijelaskan Kepala SKW I BKSDA Bengkulu Said Jauhari, S.Hut, M.Si kemarin, adapun satwa liar yang dilepasliarkan tersebut yaitu satu ekor Kungk Sumatera (*Nycticebus coucang*) yang berjenis kelamin jantan berumur remaja. Satwa tersebut hasil serahan masyarakat di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang.

Kemudian, lanjut Said, satu ekor Owa Sumatera (*Symlhalangus syndactylus*) berumur remaja dengan jenis kelamin hasil penyerahan masyarakat dari Kabupaten Lebong. Serta satu ekor Owa Sumatera (*Symlhalangus syndactylus*) berumur dewasa berjenis kelamin betina hasil penyerahan dari masyarakat Kecamatan Sindang Kelingi.

"Hari ini kita melepasliarkan tiga satwa dilindungi berupa satu ekor kukung sumatera dan dua ekor owa sumatera. Semua satwa dilindungi tersebut berasal dari penyerahan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Lepas liar kita lakukan di kawasan TWA Bukit Kaba," sampai Said.

Ditambahkan Said, selain satwa liar dilindungi, mereka juga kemarin melepaskan dua ekor ular yang bukan satwa dilindungi. Masing-masing satu ekor Ular Sanca Kembang (*Python reticulatus*) berumur dewasa dari penyerahan salah satu komunitas pecinta hewan. Serta satu ekor Ular Hijau (*Python reticulatus*) berumur dewasa juga penyerahan dari salah satu komunitas pecinta hewan. "Meskipun tidak dilindungi, namun dari inisiatif komunitas pecinta hewan tersebut bernisiatif untuk minta bantuan dilakukan lepas liar," demikian Said. (dtk)



JAWABAN SAHE: Paslon nomor urut 3 Syamsul-Hendra (SAHE) saat memberikan jawaban dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan soal BA yang tidak ditandatangani saksi paslon lain.

Syamsul: Serahkan Kepada Mekanisme

CURUP – Pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Kabupaten Rejang Lebong (RL) terhadap hasil pemungutan suara Pilkada RL sudah selesai dilaksanakan. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Syamsul-Hendra (SAHE) menjadi peraih suara terbanyak dengan jumlah raihan 43.540 suara. Namun pada penghujung pleno, paslon dari pasangan lain tidak ada yang menandatangani Berita Acara (BA) hasil rapat pleno.

Menanggapi hal tersebut, paslon SAHE tidak terlalu mau banyak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan tahapan yang sedang berjalan saat ini. "Soal bagaimana kedepan, kan ada tahapan batas waktu senggaraan kalau ada hal-hal yang merugikan paslon lain. Jalur dan mekanismenya sudah ada dan dilindungi aturan perundang-undangan. Jadi serahkan kepada mekanisme dan tahapan," sampai Calon Bupati Nomor Urut 3 Syamsul Effendi.

Menurutnya, sambung Syamsul, terpenting bagi mereka saat ini, bahwa blanko C1 sudah ditandatangani dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten dan rekapitulasinya juga sudah selesai diproses disetiap tingkatan. Artinya secara prosedural, perolehan suara yang didapatkan SAHE itu sah dan diakui serta benar adanya. "Bagi kami itu saja. Soal BA ditandatangani atau tidak, itu hak mereka dan kami juga tidak bisa memaksa," imbuh Syamsul.

Senada, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Hendra Wahyudiansyah, SH menyampaikan bahwa soal tidak ditandatanganinya BA hasil rekapitulasi tiap tingkatan oleh saksi paslon lain, dipersilakan untuk menyampaikan ketidakpuasan atau gugatan melalui mekanisme dan perbaikan sudah diatur dalam Pilkada. Namun di luar itu, semua pihak diharapkan tetap menjaga komitmen agar tahapan pilkada yang masih berjalan ini tetap berjalan damai kondusif tanpa ada aksi-aksi anarkis.

"Semua tahapan rekapitulasi, mulai tingkat PPS, PPK hingga pelaksanaan di tingkat kabupaten atau KPU sudah selesai dilaksanakan. Kalau memang ada paslon yang tidak puas atas hasil tersebut, silakan mengajukan gugatan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam pilkada. Dan kita berharap semua pihak bisa tetap sama-sama menjaga agar pilkada di Rejang lebong tetap berjalan damai dan kondusif sesuai kesepakatan kita sejak awal," tambah Hendra.

Untuk diketahui, dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang sudah dilaksanakan KPU Kabupaten RL pada 15 Desember 2020 lalu, Paslon Nomor Urut 3 Syamsul-Hendra (SAHE) tetap unggul dari paslon lainnya dengan perolehan 43.540 suara. Disusul paslon nomor urut 4 Fikri-Samuji dengan perolehan 37.556 suara. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Faisal-Fatrol dengan perolehan 32.094 suara dan paslon nomor urut 2 Susilawati-Ruswan (SR) dengan perolehan 31.610 suara. (dtk)

Perbaikan Selesai, Distribusi Air Kembali Mengalir

CURUP - Pelanggan di Desa Air Bening, Babakan Baru, Bangun Jaya dan Tebat Tenong Luar Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR), kemarin sudah mulai merasa lega. Pasalnya air bersih distribusi dari PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong (RL) sudah mengalir kembali sejak kemarin.

Hal ini disampaikan Direktur PDAM Kabupaten RL Orin Retnowati kepada RB kemarin. "Alhamdulillah perbaikan sudah selesai dan air ke pelanggan di beberapa desa tersebut sudah berangsur normal. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi untuk distribusi alir PDAM ke empat desa tersebut dan sekitarnya," sampai Orin.

Dilanjutkan Orin, proses perbaikan pipa yang rusak memang cukup memakan waktu dan tenaga, karena titik kerusakan cukup banyak terjadi. Ditambah persewaan atau stock pipa yang mereka miliki belum atau tidak memadai. Namun perbaikan tetap bisa dilakukan dan dimaksimalkan hingga selesai setelah beberapa hari.

"Petugas kita alhamdulillah bisa memaksimalkan perbaikan dengan keterbatasan peralatan yang ada. Karena selain memang banyak yang cukup rusak, pipanya juga kita kekurangan stock. Tapi tetap kita maksimalkan dan perbaikan sudah selesai dan air bisa kembali mengalir ke pelanggan," sampai Orin.

Dilanjutkan Orin, kendala lainnya mengapa perbaikan cukup memakan waktu yang lama, lokasi jalur pipa saat ini sudah tidak memungkinkan lagi. Karena berada di pinggir tebing atau jurang dan cukup rawan. Sehingga mereka melakukan pemindahan jalur pipa terlebih dahulu ke lokasi yang lebih aman.

"Satu lagi yang membuat petugas cukup membutuhkan waktu melakukan perbaikan, jalur pipa terpaksa dipindah. Karena lokasi yang lama sudah tebing jurang dan cukup berbahaya. Sehingga kita pindahkan dulu jalur pipanya baru melakukan perbaikan dan pemasangan pipa agar air bisa mengalir normal ke pelanggan," demikian Orin. (dtk)

Polres Imbau Masyarakat Tetap Jaga Kondusifitas

CURUP – Sepanjang tahapan Pilkada mulai dari pencoblosan hingga tapanan rekapitulasi tingkat TPS, kecamatan hingga tingkat kabupaten suasana dan kondisi di kabupaten Rejang Lebong (RL) berjalan kondusif. Sehingga hal ini tetap harus dijaga oleh seluruh pihak dan masyarakat pasca selesainya pilkada.

Imbauan ini disampaikan kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH kepada RB kemarin. "Alhamdulillah seluruh proses genting dan penting yaitu hari pencoblosan, kegiatan rekapitulasi baik di TPS, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten sudah selesai. Dan bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif dan ini harus dipertahankan serta tetap dijaga bersama," sampai Kapolres.

Dirinya berharap, sambung Kapolres, masyarakat tetap menjaga kondisi yang kondusif dilingkungan mereka masing-masing. Terlebih saat ini seluruh masyarakat juga akan memasuki libur perayaan natal dan tahun baru. Sehingga tetap harus waspada terhadap berbagai gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing.

"Setelah pilkada, kita akan memasuki libur perayaan natal dan tahun baru, sehingga seluruh masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi gangguan kamtibmas dilingkungan masing-masing. Sehingga kondisi kamtibmas di Kabupaten Rejang Lebong yang sudah berjalan dengan kondusif ini terus terjaga," demikian Kapolres. (dtk)



CEK: Ketua DPRD Kabupaten RL Mahdi Husen bersama pihak pemerintah setempat dan polsek saat mengecek lokasi jalan yang ditutup.

Polsek SK Tetap Pastikan Kondisi Aman

Terkait Penutupan Jalan

SINDANG KELINGI – Polsek Sindang Kelingi Polres Rejang Lebong (RL) Polda Bengkulu memastikan, kondisi pasca penutupan jalan di Kelurahan Beringin Tiga oleh pemilik tanah, tetap kondusif. Mereka sudah bernegosiasi dengan pihak keluarga pemilik lahan untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait apa yang melatar belakangi jalan tersebut ditutup.

Bahkan menurut Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kapolsek Sindang Kelingi Polres Saragih, SH kemarin, negosiasi juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rla Mahdi Husen yang langsung mengecek kondisi dilapangan. Selain itu, masalah tersebut juga dikoordinasikan dengan pihak kelurahan hingga kecamatan.

"Kita sudah lakukan negosiasi dengan pihak keluarga pemilik lahan agar mereka menyampai dengan masyarakat atau mensosialisasikan kepada masyarakat.

Agar penutupan jalan tersebut tidak sampai membulkan perselisihan baru dengan masyarakat nantinya. Termasuk soal alasan belum ada ganti rugi terkait pembangunan jalan yang diklaim diatas tanah milik mereka tersebut," sampai Irwan.

Selain itu, sambung Irwan, dari koordinasi dengan pihak pemerintahan setempat, baik kecamatan dan kelurahan sudah kita koordinasikan juga dan akan segera menelusuri ke pemda bagaimana status sebenarnya jalan tersebut. Tapi yang jelas, kita sudah imbau kepada pemilik lahan maupun masyarakat untuk tetap sama-sama menjaga ke kondusifan sembari pemerintah mencari solusi terbaik," demikian Irwan. (dtk)

Welan Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.

KOTA BENGKULU :
GRAHA PENA,
Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7
Telp (0736) 22060 & (0736)-20882

CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria),
Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516

MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman
Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• **JUAL TANAH** • LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 08522800488

• **KEHILANGAN** • SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No.0001/TJAgung, NIB07.06.11.120002, An Drs Buyung Jundran, Almt Desa TJ, Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

• **KEHILANGAN** • BPKB, Mobil Mitsubishi Maben GLX BD 1027 WY Noka MHMUD1W1V6J00447, Noin 4G15TB31565 A/N Pemerintah Kab Kaur

• **KEHILANGAN** • BPKB, Mobil Suzuki Pick Up Thn 2011 WY Noka MHYGDN41TB309415, Noin G15AID242250 A/N Syahrul

• **KEHILANGAN** • BPKB, Mobil Suzuki Jeep Thn 1994 BD 1978LJ Noka MHDESBI6RJO05068, Noin G1GAID115004 A/N Agusman Ardin

• **KEHILANGAN** • BPKB, Mobil Datsun GO+ Thn 2015 BD 1068 CD Noka MHBUICH2FFJ, Noin HR12737562T A/N Baharuddin

• **KEHILANGAN** • BPKB, No. I07523032, Noka. MH-JF8114CK473153, BD3781YA, Noin JF81E-1470476, A/n Anwar Fauzi

Kinerja Tidak Maksimal

Wabup Sentil Disdagkop UKM

KEPAHIANG – Kabupaten Kepahiang memiliki banyak potensi produk unggulan lokal. Jika dimanajemenkan dengan baik pola promosi dan pemasarannya, akan sangat memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini diakui Wakil Bupati Kepahiang Netti Herawati, S.Sos.

Untuk itu peran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Kepahiang, sangat dibutuhkan dalam pengembangan pasar produk unggulan lokal.

Sayangnya, menurut Wabup, peran

serta Disdagkop UKM dalam mempromosikan produk unggulan lokal, masih sangat minim. Dari hasil monitoring yang dilakukannya beberapa waktu lalu ke sejumlah desa dan perajin lokal diketahui selama ini masyarakat sulit mencari pasar produknya. Perhatian dan pendampingan dari OPD terkait sangatlah minim.

“Seperti di Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi, saat ini sudah ada peyek daun kopi, stik kecombrang, dan stik rebung. Tapi pemasarannya masih belum optimal. Masyarakat desa belum tahu mau menjual produknya ke mana. Di sini harusnya peran Disdagkop UKM mem-

bantu masyarakat memasarkan produk unggulan desanya,” terang Netti.

Untuk itu dalam waktu dekat Netti berharap Disdagkop UKM bisa menyusun program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya terkait pemasaran produk-produk lokal. Disdagkop UKM bisa bekerja sama dengan BUMDes dan pihak lainnya dalam melakukan pemasaran produk unggulan desa.

“Produk-produk lokal ini jikalau dipromosikan dan dipasarkan dengan baik, tentunya akan berdampak pada pendapatan daerah. Ke depan (tahun 2021) kita berharap OPD terkait bisa segera

menyusun program untuk pemasaran produk-produk lokal ini,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se Kabupaten Kepahiang, agar bisa fokus menampung dan mengelola produk unggulan yang ada di desanya, terkhusus hasil pertanian yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurutnya keberadaan BUMDes menjadi salah satu program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, agar dapat lebih memajukan kesejahteraan rakyat. “Kalau saat ini mungkin belum ada efeknya ke ekonomi karena

masih baru digerakan. Nanti kedepan kita harapkan ini jadi usaha untuk peningkatan perekonomian,” ujarnya.

Netti mengatakan BUMDes bukan hanya perusahaan desa yang mengelola bisnis kecil-kecilan namun diharapkan juga dapat menjadi perusahaan lokal yang menampung seluruh produk pertanian masyarakat. Sehingga warga tak kesulitan memasarkan hasil pertanian dengan jaminan harga cukup variatif.

“Harapan kedepannya demikian. Masyarakat dapat memiliki BUMDes yang bisa menampung hasil pertanian dan olahannya masyarakat sekitar,” singkatnya. (sly)

Petani HKM
Harapkan Hibah

Juga Pendampingan Pemerintah

KEPAHIANG – Petani penggarap Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kecamatan Kepahiang kesulitan mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan bantuan dan dana hibah dari pemerintah untuk peningkatan produksi pertaniannya. Hal ini disampaikan sekitar 150 orang petani HKM di Kecamatan pada reses anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Dapil I beberapa waktu lalu.

Seperti yang disampaikan Jainuri, petani HKM warga Kelurahan Dusun Kepahiang, yang mengusulkan peluang lahan HKM yang dikelolanya bisa memiliki sertifikat sendiri. Selain itu ia juga meminta peningkatan jalan perkebunan, jembatan, bantuan kopi sambung, pupuk, bibit pala dan durian serta bantuan dana pemeliharaan.

“Petani penggarap HKM selama ini menggarap lahan perkebunan yang sudah diberi izin oleh pemerintah, dengan harapan permohonan kami HKM menjadi sertifikat milik sendiri,” sampai Jainuri.

Senada disampaikan Samsir, warga Desa Pelangkian. Dia berharap Pemkab menyediakan program bantuan modal bagi usaha tani, peningkatan pembangunan jalan perkebunan, pembangunan jembatan air musi. “Harapan kami adanya bantuan modal usaha tani, pembagian alat perlengkapan pertanian, bibit dan pupuk yang merata,” sampainya.

Anggota DPRD Kepahiang Dapil I Hariyanto, S.Kom menyampaikan, petani penggarap hutan kemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapat fasilitas, melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan.

Dikatakan Hariyanto salah satunya petani meminta adanya pendampingan dan berharap pinjaman lunak dan hibah dari Kementerian Keuangan cepat terealisasi. Karena diketahui bahwa HKM merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Diskusi kita dengan petani penggarap HKM ini terkait pemaparan tentang hak dan kewajiban, intinya petani meminta agar terus ada pendampingan Poktan, seperti pengurusan izin dan lainnya. Selain pemaparan terkait penggarap HKM banyak pula usulan lain yang kita tampung dan akan disampaikan ke Pemkab,” sampai Hariyanto. (sly)



RAKOR: Bupati Kepahiang, Kapolres, dan Dandim 0409/RL saat memimpin rakor Operasi Lilin Nala 2020, di aula vicon Mapolres Kepahiang kemarin (16/12).

Siapkan Pengamanan Nataru

Operasi Lilin Nala 2020

KEPAHIANG – Berbeda dengan tahun sebelumnya. Operasi Lilin Nala 2020 yang digelar mulai pekan ini lebih memfokuskan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru) ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan ancaman bencana hidrometeorologi. Untuk itu, Polres Kepahiang bekerjasama dengan Pemkab Kepahiang dan Kodim 0409/Rejang Lebong, kemarin (16/12) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral.

Rakor yang dipimpin Kapolres

Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP dihadiri Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU dan Dandim 0409/RL Letkol Inf Sigit Purwoko, SE. Serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kepahiang dan instansi terkait lainnya.

Kapolres mengatakan rapat koordinasi dalam rangka pengamanan (Nataru) ini untuk menyamakan persepsi. “Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami dari Polres Kepahiang bersama Kodim 0409/RL, instansi terkait dan elemen masyarakat

Kepahiang, bersama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif,” sampai Kapolres.

Bupati Kepahiang menyampaikan bahwa dimasa pandemi Covid-19, perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kali ini berbeda dengan sebelumnya. Rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi bersama dalam pelaksanaan Nataru tahun ini. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kepahiang agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai Covid-19,” sebutnya.

Sedangkan Dandim 0409/RL, Letkol Inf Sigit Purwoko, SE mengemukakan kalau TNI akan tetap membackup Polres Kepahiang. Tetap bersinergi, bahu membahu bersama Polri untuk mengajak masyarakat Kepahiang menerapkan protokol kesehatan dan menciptakan situasi keamanan di Kabupaten Kepahiang.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepahiang dan sesi tanya jawab dalam menyamakan persepsi. (sly)

Terdakwa Korupsi DD Lunasi Kerugian Negara

KEPAHIANG – Sebelumnya, 17 November dan 24 November lalu, keluarga dari terdakwa korupsi Dana Desa Daspetah I, Idrus mengembalikan uang kerugian negara (KN) sebesar masing-masing Rp 30 juta. Kemarin (16/12), kembali menyerahkan uang Rp 65,5 juta ke Kejari Kepahiang.

Uang tersebut merupakan sisa dari kerugian negara yang ditimbulkan atas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) DD Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2018 lalu.

Diserahkan pihak keluarga terdakwa kepada Kasi Pidsub Riky Musriza, SH, MH yang juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut.

Setelah menerima uang tersebut, Tim JPU menitipkannya ke rekening khusus penyimpanan Kejari Kepahiang, dan akan segera dimintakan izin penyitaan ke pengadilan dalam waktu dekat ini.

“Sampai saat ini sudah Rp 125,5 juta yang dikembalikan oleh pihak terdakwa Idrus. Uang tersebut merupakan bagian dari kerugian negara

atas perkara yang menjerat terdakwa,” ujar Riky.

Diketahui sebelumnya, dalam perkara ini Kejari Kepahiang menetapkan tiga orang tersangka (kini terdakwa), yakni, mantan kades Daspetah I, Endar Husen, mantan Kaur Pemerintahan Idrus, dan mantan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bobi Ardi. Untuk dua terdakwa diakui Riky, hingga saat ini sama sekali belum mengembalikan kerugian negara.

“Terdakwa Endar Husein harus mengembalikan KN senilai Rp 212

juta lebih. Sedangkan terdakwa Bobi Ardi harus mengembalikan Rp 47 juta. Kita berharap kedua terdakwa ini juga mempunyai niat baik untuk melakukan pengembalian KN,” jelas Riky.

Adapun pekerjaan yang dialokasikan DD/ADD Daspetah I Tahun 2018 tersebut, terindikasi korupsi yakni pada pembangunan pelapis tebing, pembukaan badan jalan, pembangunan jalan telpat, dan pembangunan plat duiker. Dimana dari empat item pekerjaan ini menghabiskan anggaran mencapai Rp 800 juta. (sly)



KETERANGAN: Personel Satreskrim Polres Kepahiang meminta keterangan dari saksi atas kasus penipuan yang terjadi beberapa bulan lalu.

Amankan Empat Tersangka
Penipuan Jual Beli Mobil

KEPAHIANG – Satuan Reskrim Polres Kepahiang berhasil mengamankan empat tersangka penipuan jual beli mobil. Mereka, BH (42), IG (29), dan RA (30), ketiganya warga Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang. Serta DS (23) warga Desa Bajak, Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Benteng.

Penangkapan keempat tersangka berawal dari laporan korban, Andriansyah (26) warga Kelurahan Pensiunan Depan Kecamatan Kepahiang

pada 28 Agustus 2020. Laporan polisi nomor: LP/B-718/VIII/2020/BENGKULU/Kepahiang.

Andriansyah merasa telah ditipu oleh BH saat membeli 1 unit mobil Suzuki Futura warna hitam dengan nopol BD 9886 BD. Dari laporan yang disampaikan korban tersebut, aparat kemudian melakukan penyelidikan.

Baru pada 15 Desember lalu sekitar pukul 10.30 WIB, aparat akhirnya berhasil mengamankan tersangka BS di rumahnya di Kecamatan Kepahiang.

“Dari keterangan tersangka BH, diketahui bahwa dalam melakukan aksinya ia bekerja

sama dengan tersangka DS. Tidak menunggu waktu lama, kami pun kemudian menangkap tersangka DS di Kabupaten Bengkulu Tengah,” terang Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu. Welliwanto Malau, S.IK, MH kemarin (16/12).

Setelah berhasil mengamankan BH dan DS, aparat kemudian kembali mengamankan dua tersangka lainnya yakni IG dan RA yang ikut melakukan transaksi jual beli mobil tersebut bersama BH kepada korban.

“Saat ini keempat tersangka sudah kita amankan di Mapolres Kepahiang, guna penyelidikan lebih lanjut,” demikian Welliwanto. (sly)

PERUMAHAN CLUSTER TENGAH PADANG RESIDENCE
Lokasi: Jl. Iskandar, 50m dari Masjid Jamik Depan SMPN 3

PERUMAHAN BATANG HARI PERMAI II
Lokasi: Jl. Batang Hari Kel. Nusa Indah

PERUMAHAN MINIMALIS AHSANI RESIDENCE
Lokasi: Jl. Dempo 4 Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Miliki Segera Perumahan Subsidi : **Stock Terbatas!!**

BENTIRING PERMAI III
Lokasi: Jl. Darma Wanita Kel. Bentiring

PEMATANG PERMAI
Lokasi: Jl. Perintis Kel. Pematang Gubernur

SURABAYA PERMAI V
Lokasi: Jl. Nakau - Air Sebaku Kel. Surabaya

KPR Bisa Melalui **Bank @ BTN**

Hubungi: **PT. AHSANI KARYA**
Jl. Fatmawati No. 16 A Penurunan (Depan SD 2) Kota Bengkulu
Telp. 0736-24996, HP. 085279648787, 082175712286, 082371305405

STOK TERBAIK

KORPRI IDAMAN ESTATE
Rumah Type 36 Subsidi

Lokasi: Jl. Korpri IV RT 08 RW 05 - BENTIRING

Milikilah Rumah Idaman Anda bersama Kami

PROMO BULAN INI **5 Juta** TERIMA KUNCI SKB

ANGSURAN MULAI **Rp. 877.741**

DIDUKUNG KPR **Bank @ BTN**

Segera Hubungi...!! ☎ 0852 6791 1112
☎ 0853 8431 2727 ☎ 0821 8265 4441

PT. IDAMAN GRAHA MANDIRI
Kantor Pusat : Blok No. 8 - 9 Jl. Tribrata - Kel. Cempaka Permai
Telp. (0736) 25319 - BENGKULU

PUSAT OBAT KUAT IMPORT/TOCKER

VIMAX OIL & LINTAH OIL
(satu Menit Dioles Langsung Reaksi Tambah Besar dan panjang)

~ **VIMAX OIL** : Menambah ukuran penis tambah besar, tambah panjang 1 x oles langsung reaksi. Hasilnya dalam (3 x pemakaian) permanen untuk selamanya.

~ **PROKOMIL SPRAY** : Khusus untuk tahan lama kuat ereksi 1 x oles tahan untuk satu malam.

~ **Sony Tablet** : Mengobati penyakit yang sudah lama diderita : L. Syphilis/impotensi, K. Manis, H. Encer, Sakit Pinggang, Sakit Gula, Reumatik, cepat membangun serta memproduksi sperma pria. Menambah kekuatan hubungan suami/istri 100% patent. Tanpa efek samping telah banyak terbukti.....

~ **CREAM PAYUDARA** : Membedakan, memadamkan, memotokan PAYUDARA, menghilangkan keriput lembek. Hasilnya (3 x oles) langsung kelihatan permanen untuk selamanya.

~ **JUGA TERSEDIA** : P. Langsing, P. Gemuk badan, Pemutih wajah, Peninggi Badan/Pembangkit gairah wanita (prigid) menjadi normal, juga tersedia berbagai merk jamu import yang lain. Tersedia accessories untuk pria/wanita yang super canggih, antik dan modern.

HUBUNGI DISTRIBUTOR **HU - SENG** **Jl. Tenggiri No.20 Depan Pasar Ikan**
Kampung Cina Kota Bengkulu
HP. 0821 8270 7707

Pesanan : Dalam kota diantar - luar kota dikirim

TELEPON PENTING

Call Center Polsek Karang Tinggi :

Perwira Penghubung :	081278617339
RSUD Benteng :	081368965552
Pos A Nakau :	085279125960
Pos B Meringgi Sakti :	085279125930



DIRAZIA: Gerai Indomaret di Kecamatan Karang Tinggi.

Indomaret Didenda Rp 500 Ribu

BENTENG - Tim Satgas Benteng kembali melaksanakan razia yustisi penegakan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (prokes) di tempat wisata dan pelaku usaha. Sasaran razia tim Satgas kali ini tertuju pada pasar, bank, Indomaret dan Alfamart yang ada di kawasan Kecamatan Karang Tinggi.

Kabid Trantibum Satpol PP Benteng, Nur Hidayat mengatakan, dalam razia yang digelar ini, tim Satgas mendapatkan gerai Indomaret yang berada di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi tidak menerapkan prokes sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tim Satgas menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 500 ribu terhadap gerai Indomaret tersebut.

"Gerai Indomaret tersebut tidak menerapkan prokes dikarenakan tidak tersedianya air untuk mencuci tangan. Tempat airnya ada, namun air kosong. Sedangkan sebelumnya kita selalu mengingatkan dan memberikan sosialisasi perihal ini. Akan tetapi yang bersangkutan tetap tidak mendengarkan, maka sanksi tegas harus kita berikan sesuai perbup," tegas Dayat.

Dia menambahkan, dalam memberikan sanksi kepada gerai indomaret tersebut, pihaknya menawarkan dua opsi yang terdiri dari sanksi denda sebesar Rp 500 ribu atau gerai Indomaret tersebut ditutup sementara. Namun petugas Indomaret lebih memilih membayar denda sebesar Rp 500 ribu kepada tim Satgas. Apabila mereka memilih gerai Indomaret tersebut tutup sementara, maka jangka waktu mereka menutup gerai Indomaret tersebut selama 14 hari ke depan.

"Semua ini harus ditindak secara tegas, karena kita sudah melaksanakan sosialisasi terus menerus sebelum melaksanakan razia ini. Namun tetap saja mereka tidak mengindahkan imbauan kita dan tetap melanggar Perbup yang sudah ditetapkan," ungkapnya.

Dayat juga mengatakan untuk membuat masyarakat di Benteng taat dan disiplin dalam menerapkan prokes, tim Satgas akan terus melaksanakan razia hingga akhir bulan ini. Apabila masih ditemukan warga atau pelaku usaha yang melanggar, maka sanksi tegas akan langsung ditegakkan. Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat umum untuk menerapkan prokes yang sudah ditetapkan.

"Selalu memakai masker apabila di luar rumah atau melaksanakan aktivitas sehari-hari, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas dan terakhir harus menjaga jarak demi keamanan diri kita masing-masing," pesan Dayat (jee)



RAKOR: Satgas Covid-19 menggelar rakor membahas penanganan dan pencegahan Covid-19 di Benteng.

Gencarkan Penegakan Penerapan Prokes

BENTENG - Satgas Covid-19 Bengkulu Tengah (Benteng) akan lebih gencar lagi dalam penegakan Perbup Nomor No 37 Tahun 2020. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan Satgas Covid-19, kemarin (16/12).

Rakor tersebut diikuti Bupati Benteng, Sekda Benteng, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Bupati Benteng Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH mengatakan, rakor ini dilaksanakan menyikapi adanya penambahan warga Benteng yang terkonfirmasi Covid-19. Sebab dalam rilis Dinkes Provinsi sudah ada 32 warga Benteng yang saat ini terpapar Covid-19.

"Saya meminta tim Satgas gencar dan mengoptimalkan kembali penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 di

Benteng. Penegakan Perbup perihal penerapan prokes terhadap masyarakat juga harus digencarkan," tegasnya.

Ferry berharap semua yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 benar-benar serius dan tulus untuk bekerja melaksanakan tugasnya. Karena ini semua untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini kembali terjadi di Kabupaten Benteng. "Kita berharap wabah Covid-19 ini cepat hilang dan tidak terjadi lagi warga kita yang terjangkit Covid-19" harapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Benteng, Edy Hermansyah, S.Si, M.Sc, Ph.D menjelaskan, setelah rakor dilaksanakan, Pemkab dapat mengidentifikasi dengan jelas dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Pertama, tim Satgas harus lebih gencar lagi menegakkan prokes. Selanjutnya, bagaimana tim

Satgas melakukan penanganan terhadap warga yang sudah terjangkit Covid-19.

"Dalam penanganan pasien yang terkonfirmasi covid, kita meminta kepada OPD terkait dalam hal ini Dinkes dan RSUD untuk memaksimalkan semua petugas medis dalam melakukan penanganan agar tidak terjadinya penyebaran yang sangat luas. Kita juga sudah membentuk tim atau regu terkait pelaksanaan pemakaman terhadap warga yang meninggal terkonfirmasi positif Covid-19," jelasnya.

Dia menambahkan tim pemakaman terdiri dari Dinkes, Dinsos, TNI/Polri dan lingkungan kecamatan setempat. "Jadi apabila ada warga Benteng yang terkonfirmasi Covid-19 dan meninggal dunia, maka dalam pelaksanaan pemakaman diwajibkan dengan menerapkan prokes dan dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk," paparnya. (jee)



KPU: Semua pegawai Sekretariat KPU Benteng akan dilakukan pengambilan sampel swab pasca pilkada dilaksanakan.

35 Pegawai Sekretariat Diambil Sampel Swab

BENTENG - Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat KPU Benteng akan melaksanakan pengambilan sampel swab terhadap Komisioner KPU dan pegawai sekretariat. Swab ini harus dilakukan untuk mengantisipasi dan memastikan semua jajaran Sekretariat KPU Benteng dalam kondisi sehat dan tidak terpapar Covid-19.

Sekretaris KPU Benteng, Raja Sahnun, SP mengatakan

sebelum pelaksanaan pilkada seluruh jajaran di Sekretariat KPU sudah melaksanakan swab. Setelah pilkada ini, kembali dilakukan pengambilan sampel swab.

"Dengan sudah dilaksanakannya swab ini nantinya dapat memastikan semua pegawai sekretariat benar-benar aman dan tidak terkena Covid-19. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya klaster baru setelah pilkada," tegasnya.

Sahnun menambahkan swab akan dilaksanakan pada 19-20 Desember ini atau setelah pleno KPU Provinsi Bengkulu dilaksanakan. "Untuk pelaksanaan swab ini akan dilaksanakan terhadap 35 orang pegawai Sekretariat KPU. Terdiri dari 17 orang ASN dan 18 orang pegawai honorer. Ditambah 5 Komisioner KPU. Jadi kita pastikan semua pegawai Sekretariat KPU wajib diswab pasca pilkada ini," tegasnya. (jee)

Warga Dilarang Gelar Acara Nataru

BENTENG - Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH melarang warga Benteng menggelar acara menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini disampaikan dalam rapat yang digelar kemarin (16/12).

Bupati Benteng sudah memerintahkan Sekda untuk membuat surat edaran (SE) untuk meminta dan mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan acara dalam menyambut Nataru. Apabila ditemukan masih ada warga yang membandel, maka akan tim Satgas akan membubarkan acara tersebut.

"Kita sudah mengambil kebijakan dan memutuskan untuk melarang masyarakat melaksanakan perayaan malam tahun baru dengan mengadakan acara dan mengumpulkan banyak orang. Apabila terbukti saya sudah perintahkan kepada tim Satgas untuk membubarkan acara tersebut," tegas Ferry.

Dia menambahkan, semua ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Benteng. Kebijakan ini salah satu cara untuk memutuskan rantai penyebaran

Covid-19. Sebab saat ini penambahan warga yang terpapar Covid-19 semakin banyak.

"Semoga dengan adanya SE dan imbauan ini, masyarakat Benteng bisa memahaminya agar tidak menggelar acara perayaan menyambut nataru. Sambutlah natal dan tahun baru dengan tetap berada di rumah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang, demi keamanan kita bersama," terang Ferry.

Sekda Benteng, Edy Hermansyah, S.Sos, M.Sc, Ph.D membenarkan Bupati Benteng sudah meminta untuk membuat SE perihal larangan mengadakan acara perayaan Nataru. SE sudah dibuat dan akan segera diadarkan dan diberitahukan kepada semua masyarakat.

"Imbauan ini harus kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Benteng untuk mematuhi yang sudah ditetapkan dalam SE. Apabila tetap dilaksanakan acara, maka dengan sangat terpaksa acara tersebut harus dibubarkan. Semua ini harus dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19," jelas Edy. (jee)

Bangun Dinding Penahan Longsor

BENTENG - Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaksanakan pembangunan dinding penahan longsor di empat titik di wilayah Benteng. Dalam pembangunan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan sebesar Rp 12 miliar.

Pengawas BPJN Kementan PUPR, Jufron mengatakan untuk empat titik pembangunan dinding penahan longsor yang dimaksud, diantaranya 2 titik di Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Taba Penanjung serta liku sembilan. Proyek ini sudah dilaksanakan sejak November 2020 dan akan ditargetkan rampung pada Oktober 2021.

"Pengerjaan tahap awal berlokasi di Kelurahan Taba Penanjung dengan dana awal Rp 3 miliar.

Pengerjaan di titik ini dikerjakan terlebih dahulu dikarenakan lokasi tersebut sering terjadi longsor. Sehingga untuk menghindari terhambatnya aktivitas masyarakat kita melaksanakan tahap awal di sana terlebih dahulu," kata Jufron.

Jufron menambahkan, untuk papan proyek pengerjaan dipasang di depan mess karyawan letaknya di area pengerjaan proyek. "Agar dilihat oleh pengendara yang melintas, kami akan memindahkan ke tempat yang bisa dilihat masyarakat umum.

Semoga pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar dan ke depannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebab sama-sama kita ketahui dengan sudah dibangunnya penahan longsor ini setidaknya mengurangi risiko terjadinya bencana longsor di Kabupaten Benteng," terang Jufron. (jee)

Bupati Minta Perhatikan Perbankan

Kepala OJK Kunker ke Pemkab Benteng

BENTENG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu diharapkan terus membina dan membantu kondisi perbankan di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Benteng. Hal ini disampaikan Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH saat menerima kunjungan kerja Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Tito Adji S di Pemkab Benteng, kemarin (16/12).

"Saya juga bertanya perihal kondisi Bank Bengkulu kepada kepala OJK, karena kebetulan saya salah satu pemegang saham Bank Bengkulu.

Alhamdulillah katanya, kondisi Bank Bengkulu saat ini sudah membaik," jelasnya.

Ferry berharap Bank Bengkulu bisa bertahan, kembali memperoleh keuntungan dan normal seperti semula. Karena semua pihak sangat tidak menginginkan apabila Bank Bengkulu ini merugi.

"Kepala OJK juga siap bekerja dalam mengawasi dan membimbing semua perbankan yang ada di Bengkulu khususnya Kabupaten Benteng ini. Semoga dengan dilakukannya kunker ini, ke depannya ada hubungan dan ikatan yang baik antara OJK Provinsi Bengkulu dan Pemkab Benteng," pungkasnya. (jee)



KUNKER: Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Tito Adji S bersama Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH.

PROMO PALING MURAH
DISKON PALING BESAR Agung TOYOTA

Agya Angsuran 2,6 Jt
Calya Angsuran 2,7 Jt
Avanza Angsuran 3,5 Jt
Pick Up Hilux Angsuran 4,9 Jt
Dyna Dump Truck Angsuran 8 Jt
Rush Angsuran 4,4Jt
Innova Angsuran 5,6Jt
Fortuner Angsuran 8,5Jt

Promo Paling Murah Discon Paling Besar Buruan Hanya dibulan ini

Jangan Malu Bertanya Yaa...
Melayani Pemesanan Mobil, Booking Service dan info Spare Part
Proses Cepat & Mudah Bertabur Hadiah

Minat...??? Hubungi Anto, S.Sos
HP/WA : 0852 6869 8619
Facebook : Irwanto SSOS

AYO LAWAN COVID-19



Adaptasi Kebiasaan Baru WASPADA COVID-19 CORONAVIRUS DISEASE 2019

Rakyat Bengkulu KAMIS, 17 DESEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 16



Ringankan Beban Masyarakat

Polri Salurkan 100 Ton Beras

BENGKULU - Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 sekarang ini berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat. Bahkan, masyarakat ekonomi bawah justru sangat merasakan himpitan ekonomi sejak wabah Covid-19 merebak.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak tersebut, Polda Bengkulu kembali membagikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat. Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si melalui Kabid Humas Kombes Pol Sudarno, S.Sos, MH menerangkan Polda Bengkulu melakukan penyaluran bantuan berupa beras sebanyak 100 ton.

Sudarno mengatakan penyaluran beras kepada masyarakat tersebut dilakukan langsung oleh personel Polres jajaran se Provinsi Bengkulu. "Setiap Polres jajaran menyalurkan 10 ton beras kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayahnya masing-masing," jelas Sudarno.

Penyaluran bantuan beras dari Polri tersebut khusus kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak. Serta masyarakat yang belum menerima bantuan pemerintah sebelumnya. "Mudah-mudahan bantuan ini akan dapat meringankan saudara-saudara kita yang terdampak ekonominya di masa pandemi Covid-19 ini," harap Sudarno. (zie)

BANTUAN: Personel Polri dan TNI saat menyalurkan beras kepada masyarakat terdampak Covid-19.

HASRUL/RB

LINTAS Disiapkan Jadi RS Darurat

BENGKULU - Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyiapkan rumah sakit (RS) darurat mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 di Bengkulu. Tempat yang akan akan dijadikan rumah sakit darurat yakni Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Bengkulu di Jalan Cimanuk, Padang Harapan, Kota Bengkulu.



HERWAN ANTONI

Langkah antisipasi ini dilakukan karena daya tampung RSUD M. Yunus (RSMY) Bengkulu yang menjadi rujukan pasien Covid-19 penuh.

Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si mengatakan, saat ini RSMY over kapasitas sehingga banyak pasien yang tidak terlayani. Bahkan antrian sehingga harus di backup dengan rumah sakit darurat. "Tambahan rumah sakit darurat untuk antisipasi ledakan pasien dalam jumlah besar Karena itu Gedung Bapelkes dijadikan RS darurat sekaligus tempat karantina," katanya.

Selama ini, kata Herwan, Bapelkes Bengkulu dijadikan tempat penampungan bagi pasien suspek dan sekarang dijadikan tempat isolasi bagi pasien positif terjangkit virus corona. Dengan demikian, pasien covid tidak hanya menjalani isolasi di rumah sakit, tapi juga bisa di Bapelkes," jelasnya.

Herwan menambahkan persiapan untuk rumah sakit darurat ini, kabupaten juga telah menyiapkan rumah sakit darurat yang ada di kabupaten. (hkm)

Teknis Pemberian Vaksin

BENGKULU - Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Bengkulu Lisyenti Bahar mengatakan imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Imunisasi melalui vaksin, terbukti sebagai pendekatan kesehatan masyarakat yang paling efektif.



LISYENTI BAHAR

"Dengan kata lain telah terbukti bahwa tanpa vaksin dan program imunisasi manusia tidak bisa menang melawan virus," katanya.

Dalam pemberian vaksin Covid-19, pada prinsipnya vaksinasi diberikan pada orang sehat yang belum terinfeksi Covid-19 untuk melindungi dirinya. Siapa yang diberikan adalah mereka yang memiliki risiko tinggi tertular sehingga diberikan terlebih dahulu. "Vaksin untuk orang sehat, sedangkan obat untuk orang sakit. Artinya, syarat utama vaksin adalah keamanannya harus terjamin. Membuat vaksin jauh lebih sulit dan syaratnya lebih berat dari pada membuat obat. Target pemberian vaksin agar orang sehat kebal atau memiliki antibodi terhadap penyakit tertentu," terang Lisyenti.

Menurutnya, masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi nanti adalah orang dalam kondisi sehat. Sebelum vaksin diberikan, dokter atau tenaga keperawatan akan melakukan screening atau pemeriksaan untuk memastikan apakah seseorang sehat atau tidak untuk diberi vaksin. "Pasien yang positif Covid-19 bisa divaksin asalkan sudah sembuh. Apabila belum sembuh maka akan ditunda dulu untuk pemberian vaksin sampai benar-benar sehat," bebernya. (hkm)

Tetapkan 4 RS Darurat Covid-19

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan rapat evaluasi penanganan Covid-19, dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu dan perwakilan seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di Provinsi Bengkulu. Beberapa langkah diambil Pemprov dalam upaya penanganan kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

"Pertama kita telah menetapkan ada empat rumah sakit darurat yang akan kita usulkan ke kementerian," kata Rohidin.

Keempat rumah sakit darurat ini, sambung Rohidin, dapat mewakili setiap wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu selain karena infrastrukturnya memang sudah tersedia. Meliputi Bapelkes Bengkulu di Kota Bengkulu, Wisma Atlet di Kabupaten Bengkulu Utara, Rusunawa di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan di Kabupaten Rejang Lebong.

"Ini nanti kita harapkan yang mana untuk kasus ringan dan sedang akan mendapat tindakan di rumah sakit darurat tersebut. Kalau rumah sakit yang ada over kapasitas, rawan terjadi penularan Covid-19," beber Rohidin.

Selain mengusulkan 4 rumah sakit daru-

rat, langkah yang diambil Pemprov yaitu dengan melakukan penambahan tenaga kesehatan honorer untuk penanganan Covid-19 dalam waktu dekat. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional kesehatan penanggulangan dan optimalisasi penanganan Covid-19.

"Nantinya, tenaga kesehatan tersebut akan ditugaskan di masing-masing rumah sakit darurat yang sudah kita usulkan. Hal ini dilakukan, karena banyaknya tenaga medis kita ikut terparap selama menjalankan tugas mereka menangani pasien yang terkonfirmasi," papar Rohidin.

Selain itu Rohidin meminta masing-masing kabupaten/kota dapat menyediakan PCR dan melakukan pemeriksaan secara rutin agar hasil sampel yang ditunggu tidak terjadi penumpukan yang semakin banyak. Sehingga hasil pemeriksaan cepat diketahui, dan dapat segera dilakukan penanganan terhadap sampel yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. "Kita juga meminta kepada masing-masing kabupaten/kota untuk mengupgrade, menyiapkan ruang isolasi yang baik," ucap Rohidin. (key)

Usulkan Penambahan PCR dan Ventilator

BENGKULU - Pemprov Bengkulu akan mengusulkan penambahan alat tes polymerase chain reaction (PCR) dan ventilator ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga dapat meningkatkan tracing, testing dan treatment (3T) dalam rangka mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, menerangkan Pemprov Bengkulu akan melakukan pengusulan penambahan pengadaan PCR dan ventilator ke Kemenkes. Tambahan alat ini diharapkan dapat membantu penanganan Covid-19 mengingat dalam dua bulan terakhir angka positif berada di posisi 16 persen.

"Kasus positif terus bertambah, dan untuk tracing terhadap kasus ini kita butuh tambahan PCR. Selain itu untuk penanganan pasien kita juga butuh ventilator tambahan. Ini juga sudah pernah kita ajukan," kata Herwan.

Herwan menambahkan, selain melakukan penanganan terhadap kasus Covid-19 paling penting juga harus dilakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Provinsi Beng-

PENAMBAHAN KASUS POSITIF COVID-19, RABU (16/12)



kulu. Untuk mencegah kasus semakin meningkat, maka disiplin terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat juga harus ditingkatkan. Pemerintah sendiri tidak dapat menekan angka Covid-19 tanpa kerjasama dari masyarakat.

"Kita harus menjalankan instruksi yang disampaikan gubernur dalam penegakan protokol kesehatan agar diperketat kembali. Butuh peran masyarakat juga untuk menekan kasus Covid-19, dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan," imbau Herwan.

Sementara itu, per Rabu (16/12) terdapat penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 156 kasus. Menjadi rekor tertinggi dalam penambahan kasus di Provinsi Bengkulu dalam satu hari. Penambahan kasus baru ini berasal dari 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Bengkulu sebanyak 56 kasus, Rejang Lebong ada 21 kasus, Lebong ada 1 kasus, Bengkulu Utara 17 kasus, Bengkulu Selatan 13 kasus, Bengkulu Tengah 3 kasus, Kepahiang ada 2 kasus, Seluma ada 3 kasus, Kaur ada 3 kasus dan Mukomuko sebanyak 37 kasus. (key)

Bubarkan Kerumunan Perayaan Tahun Baru

BENGKULU - Polda Bengkulu akan bertindak tegas bila nanti masyarakat masih ditemukan mengadakan perayaan malam pergantian tahun baru yang menimbulkan kerumunan massa. Polda Bengkulu juga tidak akan mengeluarkan izin keramaian.

Hal ini disampaikan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs Teguh Sarwono, M.Si melalui Kabid Humas Kombes Pol Sudarno, S.Sos, MH. Menurutnya, langkah itu diambil guna mencegah semakin merebaknya wabah Covid-19 di Bengkulu yang bahkan akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. "Kepolisian bersama stakeholder terkait akan mengambil sikap melakukan pembubaran apabila masih ditemukan adanya perayaan

tahun baru dengan kerumunan," tegasnya.

Dibeberkannya, sebaiknya lakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti introspeksi diri serta meningkatkan ibadah dan berdoa sehingga pandemi Covid-19 cepat berlalu.

Ia menambahkan Polda Bengkulu dan Polres jajaran juga akan meminta pihak dari pemerintah daerah baik Pemprov, Pemkot dan Pemkab untuk mengeluarkan imbauan kepada masyarakat terkait larangan berkerumun sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19. "Khususnya melalui gugus tugas masing-masing. Pelaksanaan tugas pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini akan berjalan lancar dengan dukungan seluruh pihak," pungkasnya. (zie)



RAPAT: Tim Satgas Covid-19 Provinsi Bengkulu saat diskusi bersama pada rapat evaluasi.

Perkuat Peranan Satgas, Dinkes Rapat Evaluasi

BENGKULU - Dalam rangka menanggulangi wabah pandemi yang terjadi saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 tingkat provinsi. Rapat dipimpin Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si di aula Dinkes Provinsi Bengkulu.

Herwan mengatakan, rapat ini merupakan upaya bersama dan kolaborasi tugas masing-masing sesuai dengan regulasi, SOP, pedoman, dan aturan lainnya. "Semua yang kita lakukan harus transparan agar kegiatan di bidang masing-masing benar dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan pelaporan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan serta didasarkan dengan kinerja dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu," katanya.

Ia juga menyampaikan perlu adanya kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan penguatan Satgas

Covid-19 untuk mengurangi lonjakan kasus yang tinggi. "Pengendalian ini sebenarnya sudah kita jalankan, hanya saja ke depannya memang diperlukan lebih intens lagi langkah-langkah pengendalian yang lebih riil dan dijalankan oleh Satgas yang telah ada termasuk pelaksanaan laporan kegiatannya," jelasnya.

Dalam pemaparan, berdasarkan data yang diperoleh terkait kepatuhan masyarakat dalam penggunaan masker berdasarkan indikator yang telah disusun sudah berada pada kategori tinggi dan sedang. Namun masih terjadi peningkatan kasus Covid-19 setiap harinya yang disebabkan kesadaran masyarakat untuk memakai masker masih sangat rendah.

"Angka kematian cukup tinggi, sedangkan angka kesembuhan masih di bawah angka nasional. Jadi kita harus berperan secara kolektif sesuai dengan tugas masing-masing," papar Herwan. (hkm)